

PEMERINTAH KABUPATEN TEMANGGUNG
SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

RISALAH RAPAT PARPURNA
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN TEMANGGUNG

Rapat ke : 6
Masa Persidangan : III
Tahun : 2021-2022
Pada hari : Kamis
Tanggal : 23 Juni 2022
Dimulai pada jam : 10.43 WIB.
Sampai dengan jam : 15.11 WIB.
Pimpinan Rapat : 1. Muh Amin, S.Ag - Ketua
2. Drs. Tunggul Purnomo - Wakil Ketua
3. Daniel Indra Hartoko, SE - Wakil Ketua
Sekretaris Rapat : Agus Munadi, S.Sos.,M.Si - Sekretaris DPRD
Jumlah hadir : 42 orang dari 45 orang anggota DPRD
Tidak hadir : 3 orang anggota DPRD
Acara :
1. Pembukaan;
2. Membahas Surat Bupati Temanggung Nomor :
P/408/900/23/VI/2022, tanggal 13 Juni 2022 perihal
Penyampaian Raperda Pertanggungjawaban Pelaksanaan
APBD Tahun Anggaran 2021;
3. Penutup.

Pimpinan Rapat : Yuniarto, S.P (Ketua DPRD)

Jalannya Rapat : Rapat dibuka oleh pimpinan rapat dengan kata pengantar sebagai berikut.

Assalamu'alaikum warohmatullahi wabarokatuh.

Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua.

Yang terhormat Saudara Bupati Temanggung;

Yang kami hormati Saudara Wakil Bupati Temanggung;

Yang kami hormati Para Anggota Forum Koordinasi Pimpinan Daerah atau yang mewakili;

Yang kami hormati Para Wakil Ketua dan Anggota DPRD Kabupaten Temanggung;

Yang kami hormati Saudara Sekretaris Daerah, para Asisten Sekretaris Daerah, para Staf Ahli Bupati beserta jajaran Organisasi Perangkat Daerah dan Para Camat se Kabupaten Temanggung;

Yang kami hormati Para Direktur BUMD;

Yang kami hormati Ketua KPU Kabupaten Temanggung;

Yang kami hormati Ketua Bawaslu Kabupaten Temanggung;

Hadirin, Pemerhati Dewan dan teman-teman Pers yang berbahagia, baik yang hadir di ruangan ini maupun yang mengikuti acara Rapat Paripurna pada hari ini secara virtual.

Puji syukur kita panjatkan ke hadirat Allah SWT, Tuhan Yang Maha Kuasa, karena atas limpahan rahmat, taufiq dan hidayah-Nya, sehingga pada hari ini DPRD Kabupaten Temanggung dapat menyelenggarakan Rapat Paripurna dalam rangka membahas surat Bupati Temanggung Nomor : P/408/900/23/VI/2022, tanggal 13 Juni 2022, perihal Penyampaian Raperda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2021.

Melalui kesempatan yang berbahagia ini, kami atas nama DPRD Kabupaten Temanggung menyampaikan penghargaan dan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada Saudara Bupati Temanggung dan seluruh jajaran OPD Pemerintah Kabupaten Temanggung atas diraihnya Predikat " Wajar Tanpa Pengecualian" (WTP) yang ke-10 tepuk tangan untuk Bupati dan dari Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Temanggung Tahun Anggaran 2021, walau ada beberapa catatan untuk diperbaiki dan ditindaklanjuti, DPRD selalu mendukung dan mendorong untuk senantiasa dilakukan perbaikan dan peningkatan atas Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Temanggung, sehingga ke depan kita tidak saja mempertahankan predikat "Wajar Tanpa Pengecualian" atas Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Temanggung, namun Good Governance dan Clean Government benar-benar bisa kita wujudkan.

Rapat DPRD dan hadirin yang kami hormati.

Berdasarkan Laporan Saudara Sekretaris DPRD, dari 45 Anggota DPRD telah hadir 41 anggota. Dengan demikian merujuk ketentuan Pasal 144 ayat (1) huruf b Peraturan DPRD Kabupaten Temanggung Nomor 1 Tahun 2018 tentang Tata Tertib DPRD Kabupaten Temanggung sebagaimana telah diubah dengan Peraturan DPRD Kabupaten Temanggung Nomor 1 Tahun 2019 tentang Tata Tertib DPRD Kabupaten Temanggung, Rapat Paripurna DPRD hari ini telah memenuhi kuorum dan sah untuk dilanjutkan.

Dengan selalu memohon bimbingan dan ridho Allah SWT dan dengan mengucapkan Bismillahirrohmanirrohim, Rapat Paripurna ke-6 Masa Persidangan ke III Tahun 2021-2022 DPRD Kabupaten Temanggung, hari ini Kamis, tanggal 23 Juni 2022, pukul 10.43 WIB Kami buka serta terbuka untuk umum ---- ketuk palu 3 kali.

Rapat Paripurna DPRD dan hadirin yang berbahagia

Sebagaimana undangan yang telah kami sampaikan, susunan acara Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Temanggung hari ini sebagai berikut :

1. Pembukaan;
2. Membahas Surat Bupati Temanggung Nomor : P/408/900/23/VI/2022, tanggal 13 Juni 2022 perihal Penyampaian Raperda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2021;
3. Penutup.

Kami tanyakan, apakah susunan acara tersebut dapat disetujui ?

Rapat DPRD:

Dapat!

Pimpinan Rapat:

(Ketuk palu 1 kali) Terima kasih

Rapat Paripurna DPRD dan hadirin yang berbahagia.

Perlu kami sampaikan bahwa dalam rangka memenuhi ketentuan Pasal 31 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, kaitannya dengan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD, yang menyatakan "Gubernur/ Bupati/ Walikota menyampaikan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD kepada DPRD berupa Laporan Keuangan yang telah diperiksa oleh BPK, selambat-lambatnya 6 (enam) bulan setelah Tahun Anggaran berakhir".

Dengan telah diterimanya Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) BPK RI pada tanggal 27 Mei 2022, Bupati Temanggung telah menyampaikan surat kepada Ketua DPRD Kabupaten Temanggung Nomor : P/408/900/23/VI/2022, tanggal 13 Juni 2022, perihal Penyampaian Raperda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2021.

Sebagaimana jadwal yang telah ditetapkan oleh Badan Musyawarah DPRD Kabupaten Temanggung melalui Keputusan Badan Musyawarah DPRD Kabupaten Temanggung Nomor 05/BANMUS/VI/2022 tanggal 2 Juni 2022, hari ini akan kita ikuti Penyampaian Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten Temanggung Tahun Anggaran 2021.

Mengawali acara dimaksud, kami persilakan kepada Saudara Bupati Temanggung untuk menyampaikan penjelasan sebagai pengantar Penyampaian Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten Temanggung Tahun Anggaran 2021.

Kepada Saudara Bupati Temanggung kami persilahkan ----- stop.

SAMBUTAN / PENJELASAN BUPATI TEMANGGUNG OLEH H. M. AL KHADZIQ
--

PENGANTAR RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN TEMANGGUNG TENTANG PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN TEMANGGUNG TAHUN ANGGARAN 2021

Assalamu 'alaikum warohmatullohi wabarokatuh

Selamat pagi salam sejahtera untuk kita semua

Yang Saya hormati, Saudara Ketua DPRD, para Wakil Ketua DPRD, dan seluruh Anggota DPRD Kabupaten Temanggung

Yang Saya hormati, Saudara Wakil Bupati Temanggung,

Yang Saya hormati Bapak Anggota Forum Komunikasi Pimpinan Daerah Kabupate Temanggung

Sdr. Sekretaris Daerah, Para Staf Ahli Bupati, Para Asisten Sekda, Para Pimpinan Perangkat Daerah, Camat, dan Direktur BUMD, serta para tamu undangan, pemerhati Dewan, rekan-rekan pers, serta hadirin yang berbahagia.

Pertama-tama marilah pada kesempatan yang membahagiakan ini, kita memanjatkan puji syukur kehadiran Allah SWT, Tuhan Yang Maha Kuasa, atas limpahan Rahmat dan Hidayah-Nya, sehingga kita dapat menghadiri Rapat Paripurna DPRD dalam rangka penyampaian Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Temanggung Tahun Anggaran 2021 dalam keadaan sehat, tanpa kurang suatu apapun. Rapat Dewan yang terhormat,

Sebagaimana kita ketahui bersama, bahwa berdasarkan Undang- Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara disebutkan bahwa: "Gubernur/Bupati/Walikota menyampaikan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan

APBD kepada DPRD berupa laporan keuangan yang telah diperiksa Badan Pemeriksa Keuangan, selambat-lambatnya 6 (enam) bulan setelah tahun anggaran berakhir”. Oleh karena itu, Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten Temanggung Tahun Anggaran 2021 beserta lampirannya yang Saya sampaikan pada kesempatan ini, disusun dalam semangat memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan dimaksud.

Laporan Keuangan yang merupakan lampiran utama Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten Temanggung Tahun Anggaran 2021 telah diaudit oleh Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia Perwakilan Provinsi Jawa Tengah. Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia Perwakilan Provinsi Jawa Tengah melakukan pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah dalam 2 tahap. Pertama adalah melalui Pemeriksaan Interim, yang dilaksanakan dari tanggal 2 Februari 2022 sampai dengan 21 Februari 2022, dan dilanjutkan dengan Pemeriksaan Terinci yang dilaksanakan dari tanggal 31 Maret 2022 sampai dengan 28 April 2022. Hasil Pemeriksaan BPK tersebut dituangkan dalam Laporan Hasil Pemeriksaan dan telah diterima Pemerintah Daerah pada tanggal 27 Mei 2022. Adapun Laporan Hasil Pemeriksaan tersebut terdiri dari:

- I. Laporan Hasil Pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Temanggung Tahun 2021.
- II. Laporan Hasil Pemeriksaan atas Sistem Pengendalian Intern dan Kepatuhan Terhadap Peraturan Perundang-undangan.

Rapat Dewan Yang Terhormat serta hadirin yang berbahagia,

Adapun uraian dari masing-masing Laporan Hasil Pemeriksaan dimaksud, secara ringkas dapat saya sampaikan penjelasan sebagai berikut:

- I. Laporan Hasil Pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Temanggung tahun 2021.

Atas Laporan Keuangan pemerintah Kabupaten Temanggung Tahun 2021, opini yang dinyatakan oleh BPK-RI adalah “Wajar Tanpa Pengecualian”. Opini ini merupakan pernyataan profesional pemeriksa mengenai kewajaran informasi keuangan yang disajikan dalam laporan keuangan yang didasarkan pada empat kriteria, yaitu kesesuaian dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP), kecukupan pengungkapan, kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan, dan efektivitas sistem pengendalian intern. Opini ini mengandung maksud bahwa laporan keuangan dianggap telah memberikan informasi yang bebas dari salah saji material. Auditor meyakini bahwa berdasarkan bukti-bukti audit yang dikumpulkan, pemerintah Daerah dianggap telah menyelenggarakan prinsip akuntansi yang berlaku umum dengan baik,

dan walaupun ada kesalahan, kesalahannya dianggap tidak material dan tidak berpengaruh signifikan terhadap pengambilan keputusan.

Untuk itu marilah kita senantiasa bersyukur kehadiran Allah SWT Tuhan Yang Maha Kuasa atas limpahan karuniaNya, karena dengan komitmen bersama dan kerja keras kita semua, maka kita dapat memertahankan opini WTP untuk yang ke sepuluh kalinya secara berturut turut.

Dalam hal ini saya sampaikan terima kasih kepada Saudara Ketua, Wakil Ketua, dan anggota DPRD atas koordinasi yang baik dan dukungan yang diberikan selama ini. Demikian pula ucapan terimakasih dan penghargaan setinggi tingginya kepada semua jajaran pelaksana pengelola keuangan, mulai dari Pengguna Anggaran/Barang sampai dengan staf/Pejabat Fungsional Umum, atas kerja keras, koordinasi dan kerjasamanya sehingga dapat tersusun laporan keuangan yang sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP). Ucapan terima kasih juga kami ucapkan kepada segenap Pemerintah Desa dan Kelurahan di seluruh Kabupaten Temanggung. Kunci keberhasilan dalam memenuhi kewajiban penyajian laporan keuangan yang sesuai dengan SAP adalah perhatian dan komitmen yang tinggi dari semua jajaran pelaksana pengelola keuangan. Oleh karena itu ke depan saya berharap agar kita semua tetap berkomitmen dalam memertahankan opini WTP untuk laporan keuangan tahun-tahun berikutnya.

II. Laporan Hasil Pemeriksaan atas Sistem Pengendalian Intern dan Kepatuhan Terhadap Peraturan Perundang-undangan.

Atas Laporan Hasil Pemeriksian ini, terdapat beberapa hal yang menjadi tanggungjawab kita untuk segera diselesaikan, yaitu:

1. Penyempurnaan Kebijakan Akuntansi Pemda maupun Kebijakan Akuntansi BLUD.
2. Pengendalian Pelaksanaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
3. Kesesuaian standar kegiatan berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional.
4. Pengelolaan Kas Daerah, terutama penertiban rekening-rekening yang digunakan oleh Perangkat Daerah.
5. Penatausahaan Persediaan di Perangkat Daerah dan penanganan persediaan kadaluarsa.
6. Efektivitas Penyertaan Modal pada BUMD.
7. Pengelolaan Aset Tetap.

Atas hal-hal tersebut di atas telah disusun *action plan* guna penyelesaiannya dan diharapkan dapat diselesaikan sampai akhir Semester Dua Tahun 2022.

Selanjutnya, dari beberapa hal yang tertuang dalam Laporan Hasil Pemeriksaan atas Sistem Pengendalian Intern maupun Laporan Hasil Pemeriksaan atas Kepatuhan Terhadap Perundang-undangan tersebut di atas, dapatlah kiranya menjadi bahan pembelajaran kita bersama agar ke depan lebih berhati-hati, mulai dari perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, sampai dengan pertanggungjawaban, dan tidak lagi terjadi temuan-temuan yang sifatnya berulang.

Rapat Dewan dan Hadirin yang berbahagia,

Selanjutnya, mengenai pokok-pokok Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten Temanggung Tahun 2021, berupa laporan keuangan terdiri dari 7 (tujuh) jenis laporan, secara ringkas saya sampaikan sebagai berikut:

I. LAPORAN REALISASI APBD

Realisasi APBD Tahun Anggaran 2021:

1. Realisasi Pendapatan Daerah sebesar Rp1.971.005.990.029,00 (*Satu triliun, sembilan ratus tujuh puluh satu miliar, lima juta, sembilan ratus sembilan puluh ribu, dua puluh sembilan rupiah*).
2. Realisasi Belanja Daerah sebesar Rp1.877.969.167.294,00 (*Satu triliun, delapan ratus tujuh puluh tujuh miliar, sembilan ratus enam puluh sembilan juta, seratus enam puluh tujuh ribu, dua ratus sembilan puluh empat rupiah*), sehingga terdapat Surplus sebesar Rp93.036.822.735,00 (*Sembilan puluh tiga miliar, tiga puluh enam juta, delapan ratus dua puluh dua ribu, tujuh ratus tiga puluh lima rupiah*).
3. Pembiayaan Daerah:
 - a. Penerimaan Pembiayaan terealisasi sebesar Rp162.455.516.962,00 (*Seratus enam puluh dua miliar, empat ratus lima puluh lima juta, lima ratus enam belas ribu, sembilan ratus enam puluh dua rupiah*).
 - b. Pengeluaran Pembiayaan terealisasi sebesar Rp1.243.879.610,00 (*Satu miliar, dua ratus empat puluh tiga juta, delapan ratus tujuh puluh sembilan ribu, enam ratus sepuluh rupiah*).
 - c. Pembiayaan Netto sebesar Rp161.211.637.352,00 (*Seratus enam puluh satu miliar, dua ratus sebelas juta, enam ratus tiga puluh tujuh ribu, tiga ratus lima puluh dua rupiah*).

Berdasarkan Surplus dan Pembiayaan Netto tersebut, Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun 2021 sebesar Rp254.248.460.087,00 (*Dua ratus lima puluh empat miliar, dua ratus empat puluh delapan juta, empat ratus enam puluh ribu, delapan puluh tujuh rupiah*).

II. LAPORAN PERUBAHAN SALDO ANGGARAN LEBIH (SAL)

Saldo Anggaran Lebih pada Akhir Tahun 2021 sebesar Rp254.248.460.087,00 (*Dua ratus lima puluh empat miliar, dua ratus empat puluh delapan juta, empat ratus enam puluh ribu, delapan puluh tujuh rupiah*).

Saldo Anggaran Lebih ini merupakan jumlah saldo yang berasal dari akumulasi SiLPA tahun-tahun anggaran sebelumnya dan tahun berjalan serta penyesuaian lain yang diperkenankan.

III. NERACA

Jumlah Aset Daerah pada Neraca per 31 Desember 2021 sebesar Rp3.420.435.895.674,96 (*Tiga triliun empat ratus dua puluh miliar, empat ratus tiga puluh lima juta, delapan ratus sembilan puluh lima ribu, enam ratus tujuh puluh empat rupiah, sembilan puluh enam sen*).

Nilai aset tersebut mengalami kenaikan sebesar Rp235.737.980.275,09 (*Dua ratus tiga puluh lima miliar, tujuh ratus tiga puluh tujuh juta, sembilan ratus delapan puluh ribu, dua ratus tujuh puluh lima rupiah, sembilan sen*) jika dibandingkan dengan Aset Daerah Tahun 2020 sebesar Rp3.184.697.915.399,87 (*Tiga triliun, seratus delapan puluh empat miliar, enam ratus sembilan puluh tujuh juta, sembilan ratus lima belas ribu, tiga ratus sembilan puluh sembilan rupiah, delapan puluh tujuh sen*).

IV. LAPORAN OPERASIONAL (LO)

Laporan Operasional menyajikan pos-pos Pendapatan Laporan Operasional, Beban, Surplus/defisit Kegiatan Non Operasional, Pos Luar Biasa, dan Surplus/defisit-Laporan Operasional.

Posisi Laporan Operasional Tahun 2021 adalah sebagai berikut:

1. Pendapatan Laporan Operasional sebesar Rp1.795.647.853.542,58 (*Satu triliun, tujuh ratus sembilan puluh lima miliar, enam ratus empat puluh tujuh juta, delapan ratus lima puluh tiga ribu, lima ratus empat puluh dua rupiah, lima puluh delapan sen*).
2. Beban sebesar Rp1.591.740.054.554,23 (*Satu triliun, lima ratus sembilan puluh satu miliar, tujuh ratus empat puluh juta, lima puluh empat ribu, lima ratus lima puluh empat rupiah, dua puluh tiga sen*).
3. Defisit dari kegiatan non operasional sebesar Rp1.343.541.201,32 (*Satu miliar, tiga ratus empat puluh tiga juta, lima ratus empat puluh satu ribu, dua ratus satu rupiah, tiga puluh dua sen*).

Sehingga terdapat Surplus sebesar Rp202.564.257.787,03 (*Dua ratus dua miliar, lima ratus enam puluh empat juta, dua ratus lima puluh tujuh ribu, tujuh ratus delapan puluh tujuh rupiah, tiga sen*).

V. LAPORAN ARUS KAS

Laporan Arus Kas menyajikan informasi mengenai sumber, penggunaan, perubahan kas dan setara kas selama satu periode akuntansi dan saldo kas dan setara kas pada tanggal pelaporan.

Dari Laporan Arus Kas diketahui Saldo Akhir Kas Pemerintah Kabupaten Temanggung per 31 Desember 2021 sebesar Rp254.248.891.587,00 (*Dua ratus lima puluh empat miliar, dua ratus empat puluh delapan juta, delapan ratus sembilan puluh satu ribu, lima ratus delapan puluh tujuh rupiah*).

Saldo Akhir Kas tersebut berbeda dengan SILPA karena didalamnya terdapat utang pajak per 31 Desember 2021.

VI. LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

Laporan Perubahan Ekuitas menyajikan Ekuitas Awal, Surplus/defisit-LO pada periode bersangkutan, koreksi dampak kumulatif dan koreksi kesalahan mendasar serta Ekuitas Akhir.

Dari Laporan Perubahan Ekuitas terdapat nilai Ekuitas Akhir sebesar Rp3.352.941.113.397,16 (*Tiga triliun, tiga ratus lima puluh dua miliar, sembilan ratus empat puluh satu juta seratus tiga belas ribu, tiga ratus sembilan puluh tujuh rupiah, enam belas sen*).

Ekuitas Akhir tersebut merupakan kekayaan bersih Pemerintah Kabupaten Temanggung yang merupakan selisih antara Aset dan Kewajiban per 31 Desember 2021.

VII. CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN (CaLK)

Di dalam Catatan atas Laporan Keuangan meliputi penjelasan atau daftar terinci yang disajikan secara sistematis untuk setiap pos yang ada dalam Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Saldo Anggaran Lebih, Neraca, Laporan Operasional, Laporan Arus Kas, dan Laporan Perubahan Ekuitas, agar dapat memudahkan dalam memahami laporan keuangan secara keseluruhan.

Rapat Dewan yang terhormat,

Demikian pengantar saya atas Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran dan Pendapatan Belanja Daerah Tahun 2021.

Saya menyadari, bahwa dalam proses perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, penatausahaan dan pertanggungjawaban, serta pengawasan atas pelaksanaan APBD Kabupaten Temanggung Tahun Anggaran 2021 belum dapat dilaksanakan secara optimal. Hal ini akan menjadi perhatian kita untuk perbaikan perbaikan di masa-masa yang akan datang.

Akhirnya, semoga Allah SWT senantiasa memberikan petunjuk, bimbingan, dan perlindungan kepada kita semua sebagai penyelenggara negara dan pemerintahan di daerah, dalam mengemban tugas dan tanggung jawab masing-masing, menuju peningkatan kesejahteraan masyarakat Kabupaten Temanggung yang kita cintai.

Amin, amin ya Robbal 'alamin.

Sekian, terima kasih.

Wassalamu'alaikum Warohmatullahi Wabarokatuh.

Temanggung, Juni 2022

BUPATI TEMANGGUNG,

H. M. AL KHADZIQ

Kepada Saudara Bupati Temanggung kami sampaikan terima kasih.

Rapat DPRD dan hadirin yang kami hormati.

Selanjutnya sesuai dengan ketentuan Pasal 13 ayat (3) huruf a angka 2 Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 1 Tahun 2018 tentang Tata Tertib DPRD Kabupaten Temanggung sebagaimana telah diubah dengan Peraturan DPRD Kabupaten Temanggung Nomor 1 Tahun 2019 tentang Tata Tertib DPRD Kabupaten Temanggung, setelah Bupati menyampaikan penjelasan penyampaian Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Kabupaten Temanggung Tahun Anggaran 2021, kita perlu mendengarkan Pendapat Fraksi-fraksi DPRD Kabupaten Temanggung yang disampaikan melalui Pandangan Umum Fraksi-fraksi DPRD.

Namun demikian, dengan tidak mengurangi rasa hormat, kami tanyakan apakah perlu dibuka acara Pandangan Umum Fraksi-Fraksi DPRD ?

Rapat DPRD:

Dapat!

Pimpinan Rapat:

(Ketuk palu 1 kali) Terima kasih

Untuk itu Kepada Fraksi-fraksi DPRD yang akan menyampaikan Pandangan Umumnya kami persilakan untuk mencatatkan diri -----Stop.

Menurut catatan kami ada 7 Fraksi yang akan menyampaikan pandangan umumnya yaitu :

1. Fraksi Gerindra Yang akan disampaikan oleh Sdr/i Indah Cahyani, S.Sos
2. Fraksi PDIP Yang akan disampaikan oleh Sdr/i E. Intan Kurniasari, S.E.,M.Acc
3. Fraksi PPP Yang akan disampaikan oleh Sdr/i Dedi Hariyadi, S.E
4. Fraksi Nusantara Yang akan disampaikan oleh Sdr/i Isnarwandi, S.Ag
5. Fraksi Golkar Yang akan disampaikan oleh Sdr/i Dwi Linda Wati, SH.,M.H
6. Fraksi PKB Yang akan disampaikan oleh Sdr/i Rochmat Fauzi TH
7. Fraksi PAN Berkeadilan Yang akan disampaikan oleh Sdr/i Bejo Tursiyam, S.E

Mengawali Pandangan umum Fraksi-fraksi DPRD, dipersilakan kepada:

1. Juru bicara Fraksi Gerindra untuk menyampaikan pandangan umumnya. -----
Stop.

PANDANGAN UMUM FRAKSI GERINDRA OLEH INDAH CAHYANI, S.Sos

PANDANGAN UMUM FRAKSI GERINDRA Nomor : 39 /FG-PU/ VI /2022 Terhadap :
RANCANGAN PERATURAN DAERAH TENTANG PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN
APBD KABUPATEN TEMANGGUNG TAHUN ANGGARAN 2021

Assalamualaikum Wr.Wb.

Salam Sejahtera untuk kita semua,

Yang Terhormat, Pimpinan Rapat dan para Wakil Ketua Dewan

Yang Terhormat, Sdr. Bupati Temanggung

Yang Terhormat, Forum Koordinasi Pimpinan Daerah atau yang mewakili

Yang Terhormat, Sekretaris Daerah, Kepala Badan,Kepala Dinas, Lembaga Teknis Daerah,
Direktur BUMD, serta para Camat se-Kabupaten Temanggung;

Yang Terhormat, Rekan-rekan Anggota Dewan, Jajaran Sekretariat DPRD, Rekan-rekan
Pers, Pemerhati Dewan, dan Hadirin sekalian yang berbahagia.

Puji syukur kehadirat Allah SWT yang telah melimpahkan Rahmat dan hidayah-Nya
kepada kita semua, sehingga pada hari ini kita dapat menjalankan rapat paripurna dalam
keadaan sehat tanpa halangan suatu apapun.

Terima kasih kami sampaikan kepada pimpinan rapat yang telah memberikan waktu
kepada kami untuk menyampaikan pemandangan umum Fraksi GERINDRA tentang
Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung tentang Pertanggungjawaban
Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2021.

Rapat Dewan yang terhormat dan hadirin yang berbahagia.

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Temanggung pada tahun anggaran 2021 ini merupakan APBD Pasca Pandemi yang tentunya masih menyisakan pekerjaan rumah dimasa pandemi kemarin, namun demikian pembangunan di Kabupaten Temanggung harus tetap berjalan sesuai dengan harapan masyarakat.

Rapat Dewan yang terhormat dan hadirin yang berbahagia.

Terhadap Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021, Fraksi Gerindra memberikan beberapa pertanyaan, masukan dan tanggapan, yang antara lain sebagai berikut :

1. Terhadap Pendapatan,

Dari sisi pendapatan terdapat peningkatan realisasi, dari target Rp.1.883.645.026.164,- terealisasi sebesar Rp. 1.971.005.990.029,- atau mengalami peningkatan kurang lebih sebesar 87,4 milyar, hal ini ditopang terbanyak pada pos Pendapatan Asli Daerah. Fraksi kami sangat mengasprisasi terhadap kenaikan pendapatan Asli Daerah tersebut. Namun demikian kami berharap adanya kenaikan pendapatan harusnya juga terjadi pada pos DAK dan DAU, usaha-usaha apa yang telah dilakukan Pemerintah Daerah untuk menaikan pos dari DAK dan DAU tersebut, mohon penjelasannya.

2. Beberapa temuan dari hasil Pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan menunjukan masih banyak yang harus diperbaiki dari sisi pendapatan sehingga di harapkan apabila rekomendasi dari BPK tersebut dapat dijalankan, maka peningkatan pendapatan akan sedikit terdongkrak, mohon tanggapannya.

3. Pada Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kota,

Dari kegiatan kami di lapangan monitoring dan efaluasi kami di lapangan banyak ditemukan bangunan – bangunan fisik yang sangat jauh kualitasnya, seperti bangunan Puskesmas Jumo yang terkesan mengejar target tanpa memperhatikan mutu bangunan. Bangunan Puskesmas Bulu juga sangat jauh dari spec yang di harapkan, kamar mandi yang seharusnya bersih dan nyaman sudah bocor dan beberapa bagian rusak. Serta masih banyak lagi bangunan yang tidak sesuai kualitasnya, mohon tanggapannya.

4. Mohon tanggapan pula apakah Kabupaten Temanggung memang layak mendapat predikat Wajar Tanpa Pengecualian seperti yang di terima kemarin, sedangkan masyarakat Kabupaten Temanggung belum merasakan seperti jargon Tentrem Marem Gandem yang selalu di gaungkan saudara Bupati, serta permasalahan lain yang selama ini belum terselesaikan, mohon tanggapannya.

5. Dinas Pertanian, khususnya pada kegiatan distribusi pupuk selalu menjadi catatan klasik, masyarakat sampai hari ini masih kesulitan dapatkan pupuk secara cukup sesuai dengan kebutuhan petani, mohon penjelasannya.
6. Predikat tanpa pengecualian yang ke 10 ini Fraksi Gerindra telah mengapresiasi hal tersebut akan tetapi masih terdapat beberapa catatan yang di sampaikan terhadap catatan WTP tersebut Fraksi Gerindra berharap WTP tidak dijadikan suatu Flase capaian yang diperbolistik akan tetapi capaian ockam terhadap peningkatan kesejahteraan rakyat di Kabupaten Temanggung yang menjadi ukuran utama .
7. Penanganan BUMD Aneka Usaha harus segera di tuntaskan, masih banyak piutang yang belum di tangani dan segera lalukan penagihan pada piutang yang sudah terlalu lama sehingga management BUMD milik kembali sehat atau perlu untuk tidak dilanjutkan kelangsungan usahanya, serta sampai saat ini direksi di beberapa BUMD belum terisi, mohon tanggapannya.
8. Dinas Lingkungan Hidup
 - a. Pengolahan sampah dari hulu sampai hilir harus diprogram dengan jelas dengan pemilahan sampah harus benar-benar terlaksana dengan baik dan dibuat dengan master plan yang terencana sehingga sampah yang diolah bisa menghasilkan produk daur ulang yg bermanfaat, sebagai sumber Pendapatan Asli Daerah dan yang paling utama adalah tujuan dari sampah adalah zero limbah.
 - b. Industri tentang sampah, harus di planning dari sekarang. Arah tujuannya yang harus jelas, dan sudah mulai di rencanakan agar bisa di maksimalkan dan pemanfaatan limbah sampah harus bisa 0 %. Serta bisa menjadi energi terbarukan. Semua rencana ini demi Temanggung bisa memaksimalkan potensi daerahnya dan Pemerintah Daerah Temanggung bisa mendapatkan dan menggali potensi pendapatan yg ada di Temanggung secara maksimal,
 - c. Pemerintah Daerah juga harus memberikan konsep pemberian insentif bagi desa yg bisa mengolah sampah sampai semaksimal mungkin
 - d. Tantangan pemerintah Kabupaten Temanggung mengenai sampah adalah perbaikan manajemen pemilahan sampah dan tantangan kemajuan zaman untuk menjadikan sampah sebagai sumber energi dan menciptakan lingkungan yang berkesinambungan. Transisi sampah yang tadinya tidak bisa dipakai untuk hal-hal yg lain, pemeintah daerah harus bisa menjadikan sampah sebagai sumber energi, sumber PAD juga harus ada target dan perencanaan yang jelas.
9. Adanya Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) sebesar Rp.254.248.460.087,- (dua ratus lima puluh empat milyar dua ratus empat puluh delapan juta empat ratus enam puluh ribu delapan puluh tujuh rupiah) menunjukkan masih adanya kegiatan yang

belum dapat diselesaikan sesuai dengan perencanaan sebelumnya, mohon pejasannya.

10. Mohon kepada pemerintah daerah agar dapat mengawasi penggunaan aset pemda utamanya kendaraan dinas agar tidak dipergunakan oleh oknum yang tidak bertanggung jawab dan membuat opini jelek terhadap pemda, seperti yang terjadi beberapa waktu yang lalu dan menjadi viral di media social namun sampai saat ini tidak ada kejelasan atau penjelasan apapun dan terkesan pemda tutup mata dan tutup telinga.

Hal-hal yang lain yang menyangkut capaian OPD akan kami perdalam dalam pembahasan komisi.

Rapat Dewan yang terhormat dan hadirin yang berbahagia.

Demikian pandangan umum Fraksi Gerindra, apabila dalam penyampaian ada hal-hal yang kurang berkenan, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya.

Wassalamualaikum Wr.Wb.

Temanggung, 23 Juni 2022

FRAKSI GERINDRA DPRD KABUPATEN TEMANGGUNG

Ketua Drs. Andoyo Sekretaris Indah Cahyani, S.Sos ditandatangani

Kepada saudara/i Indah Cahyani, S.Sos selaku Juru Bicara Fraksi Gerindra disampaikan terima kasih.

Selanjutnya kami berikan kesempatan kepada Juru bicara Fraksi untuk menyampaikan pandangan umumnya. ----- Stop.

PANDANGAN UMUM FRAKSI PDIP
OLEH E. INTAN KURNIASARI, S.E.,M.Acc

PANDANGAN UMUM FRAKSI PDI PERJUANGAN DPRD KABUPATEN TEMANGGUNG
TENTANG RAPERDA PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN APBD KABUPATEN
TEMANGGUNG TAHUN ANGGARAN 2021

Assalamu’alakum Warahmatullahi Wabarakatu

Salam sejahtera bagi kita semua

Yth. Pimpinan rapat beserta para wakil ketua DPRD Kabupaten Temanggung

Yth. Saudara Bupati dan wakil bupati Temanggung

Yth. Forum komunikasi Pimpinan Daerah atau yang mewakili

Yth. Sekertaris Daerah, asisten Sekda, serta jajaran eksekutifnya

Yth. Rekan – rekan anggota Dewan

Yth. Para camat se Kabupaten Temanggung

Yth. Para pemerhati dewan, wartawan dan hadirin sekalian yang berbahagia

Puji syukur kita panjatkan ke hadirat Tuhan YME karena limpahan rahmat dan berkat kepada kita semua sehingga dapat menghadiri rapat paripurna hari ini tanpa kurang suatu apapun.

Sidang yang terhormat,

Setelah mendengar dan mempelajari Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Temanggung Tahun Anggaran 2021, Kami Fraksi PDI Perjuangan ingin menyampaikan beberapa hal :

1. Dari laporan hasil audit BPK, sejauh mana kepatuhan Pemerintah Daerah atas rekomendasi laporan hasil BPK apakah sudah ada tindak lanjut yang serius?

2. DPUPKP

a. Banyak ditemukan titik – titik jalan yang terkelupas sepanjang jalan Muntung Sibajak, dilihat dari kondisi terkelupasnya disinyalir kualitas *asphalt threated base* (ATB) kurang kualitasnya, salah satunya dikarenakan hasil uji mutu aspal di laboratorium terbit setelah 2-4 minggu tentu saja ini membuka peluang bagi rekanan yang nakal untuk memesan ATB yang tidak sesuai spesifikasi. Selain itu drainase ruas jalan tersebut masih sangat buruk kualitasnya sehingga diperkirakan usia jalan tidak sesuai standarisasi yang umum.

Bagaimana Pemerintah Daerah dan Bupati akan menyikapi hal tersebut?

b. Pemeliharaan Trotoar mohon diperhatikan karena sudah jadi ruang terbuka hijau mini sepanjang jalan mungkin bisa kapan-kapan kita selenggarakan angon wedhus bareng di trotoar nggih. Selain itu juga mohon perhatiannya terhadap ranting-ranting pohon yang berada di sekitar PJU dan kabel listrik, karena itu cukup mengganggu kemanan dan juga sinar PJUnya ketika ada hujan angin seperti beberapa waktu yang lalu tentu saja cukup membahayakan pengguna jalan.

c. Saat ini masih banyak hasil pekerjaan yang beberapa mengalami kerusakan seperti jalan, irigasi, dan sarana air bersih, harap Pemerintah daerah bisa menekan rekanan yang mengerjakan infrastruktur tersebut di atas untuk memperbaiki sesuai standar teknik dan tidak mencairkan retensi apabila tidak sesuai standar teknik, sekali-sekali Pemerintah Daerah harus tegas, nggih.

3. Dinas Kesehatan

Terkait Pembangunan Puskesmas Bulu dan Jumo

a. Puskesmas Bulu

Fraksi PDI Perjuangan melihat dari segi perencanaan sudah kurang matang, ditemukan terlalu banyak terjadi perubahan (tambah kurang), sehingga hal –

hal yang pokok dan mendasar tidak terbangun sebagai mana mestinya, contoh :

- Pengurukan lahan dikurangi ketinggiannya, sehingga bagian belakang (selokan) manakala dalam kondisi banjir air bisa masuk ke dalam area Puskesmas.
- Terdapat kebocoran kamar mandi dan WC di lantai dua yang tembus (rembes) ke plafon lantai 1.
- Ditemukan Lesplan / Topi pintu keluar samping kanan hanya menutupi separo pintu.

b. Puskesmas Jumo

- Jauh lebih parah dari Puskesmas Bulu. Terdapat kebocoran kamar mandi / WC lantai 2 yang merembes sampai kamar mandi / WC lantai 1 sehingga tidak bisa digunakan. selain karena tetesan air, baunya sangat mengganggu.
- terdapat pula kebocoran atap yang tembus sampai ke plafon lantai 2.
- Terdapat colokan listrik itu letaknya di bawah washtafel, di bawah saluran airnya cukup berbahaya
- Pemasangan paving halaman keliling tidak rata
- Beberapa titik tidak rata pengecatannya, dan terlihat dari segi estetika tidak masuk
- Wifi juga belum bisa digunakan

Dari beberapa hal di atas, Fraksi PDI Perjuangan ini tidak habis pikir bangunan baru jadi belum ada penyerahan kedua (FHO) kok sudah ada kerusakan yang cukup fatal, padahal belum digunakan juga. Bahkan juga menyangkut higienis dan keamanan gedung, apakah memang perencanaan dan pengawasan hanya sebagai formalitas saja tidak dilaksanakan secara sebenarnya?

Dari 2 puskesmas tersebut, kami Fraksi PDI Perjuangan meminta jaminan kepada Bupati sebelum FHO / penyerahan final, mohon kerusakan – kerusakan tersebut di atas dapat di tangani secara standar teknis, bukan hanya sekedar perbaikan sementara yang penting bisa FHO. Ini ya standarnya harus bisa digunakan dengan umur gedungnya.

Diluar hal tersebut ada juga yang menjadi pertanyaan kami yaitu terkait pelelangannya. Pagu lelang 2 puskesmas tersebut masing-masing sebesar 9,9M. Dengan pagu lelang tersebut ternyata nilai kontrak kerjanya berbeda jauh, yang puskesmas bulu menjadi 9.093.387.000 (sekitar 92 % dari pagu lelang), sedangkan Puskesmas Jumo nilai kontrak kerjanya 9.829.157.000 (sekitar 99,3 %

dari pagu lelang). Dalam artian pemenang lelang hanya turun harga kurang dari 1% dari pagu lelang. Yang jadi pertanyaannya, Meskipun pelelangannya sudah menjadi LPSE apakah memungkinkan terjadi pengaturan?

4.RSUD

RSUD ini cukup banyak laporan nggih terkait pelayanannya, saya mohon untuk Dewan Pengawas juga lebih serius agar nantinya ke depan ini RSUD kan badan pelayanan usaha kita juga jangan sampai kukut karena nanti ada *crash action* mal praktik

- a. Bagaimana kepatuhan RSUD terhadap aturan pelaporan yang tidak sesuai dengan standar akuntansi Pemerintahan?
- b. SOP pelayanan medis kepada pasien apakah sudah sesuai? Ini kemarin saya sempat dikeluhi dingangluhi dari keluarga pasien, pasien sudah kalut, cemas, pasiennya dipasang cateter sudah dipeseni sama perawatnya, nanti cateternya kalau sudah penuh itu kantongnya dibersihkan sendiri ya. Ini tu sebenarnya perawat gimana ya, perawatnya ini niat jadi perawat atau mengalihkan malah ke keluarga pasien. Yang lucunya lagi, ini pasien bukan dari kelas BPJS gratis lho, di kelas VIP ini yang aneh.

5.Terkait Baperjakat

Mohon penjelasannya bagaimana SOP promosi perekrutannya, kami melihat banyak promosi yang kurang pas / tidak wajar, apakah sudah sesuai dengan standarisasi aturan yang ada atau hanya dilihat dari adanya faktor kedekatan dengan pembuat kebijakan?

- 6.Banyaknya PKL di beberapa titik trotoar (yang menggunakan mobil dan parkir juga), khususnya yang berada di jalan utama/ jalan nasional mengganggu pengguna, kenyamanan pengguna jalan selain itu juga secara estetika kurang, Temanggung yang dulunya terkenal karena kebersihannya, kerapihannya sekarang malah justru kebalikannya. Harap ada tindakan tegas dari pemerintah daerah.

7.Dinas Pendidikan

Terkait penerimaan PPDB di sekolah – sekolah negeri untuk lebih di perhatikan, karena masih banyak di temukan sekolah yang kapasitas ideal nya tidak terpenuhi, sementara calon siswa yang berada di zonasi sekolah tersebut banyak yang tidak tertampung.

Demikian pandangan Fraksi kami, bila ada hal dan ucapan yang kurang berkenan kami mohon maaf.

Sekian dan terima kasih.

Wassalamualaikum *Warahmatullahi Wabarakatuh*

Temanggung, 23 Juni 2021 Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Temanggung ditandatangani Ketua Dra. Titik Winarti Sekretaris Dwi Sulistyowati.

Kepada Ibu E. Intan Kurniasari, S.E., M.Acc Eselaku kami sampaikan terima kasih.

Selanjutnya kami berikan kesempatan kepada Juru bicara Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa untuk menyampaikan pandangan umumnya. ----- Stop.

PANDANGAN UMUM FRAKSI PKB

OLEH DEDI HARIYADI, S.E.

Pandangan Umum Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa DPRD Kabupaten Temanggung Terhadap Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2021

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Kepada Yang Terhormat;

Ketua Rapat dan Para Wakil Ketua DPRD Kabupaten Temanggung

Saudara Bupati Temanggung

Para Anggota Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten Temanggung

Saudara Sekretaris Daerah Kabupaten Temanggung

Para Kepala Dinas, Kepala Kantor, Kepala Badan, Kepala Bagian, dan Para Direktur BUMD,

Para Camat di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Temanggung

Sekretaris DPRD Kabupaten Temanggung

Para Anggota Dewan serta Para Tamu Undangan, Pemerhati Dewan dan rekan-rekan Pers yang berbahagia.

Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur ke hadirat Allah SWT yang telah memberikan kesehatan dan kekuatan serta kesempatan kepada kita semua, sehingga pada pagi hari ini kita dapat menghadiri Rapat Paripurna yang membahas Surat Bupati Nomor: P/408/900/23/VI/2022 tanggal 13 Juni 2022 perihal Penyampaian Rancancangan Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Temanggung Tahun Anggaran 2021.

Sholawat serta Salam semoga tetap tercurah kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW yang telah membimbing kita semua agar senantiasa berupaya melaksanakan amanah konstitusi untuk kemaslahatan dan kesejahteraan rakyat.

Sidang Dewan dan Hadirin Yang Terhormat

Dalam kesempatan ini Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa mengucapkan terimakasih kepada Pimpinan Rapat yang telah memberikan waktu kepada kami untuk menyampaikan pandangan umum Fraksi kami terkait Raperda tersebut di atas.

Sidang Dewan dan Hadirin Yang terhormat

Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD saudara bupati dapat kita ketahui bahwa Secara umum Realisasi APBD cukup menggembirakan di mana dari target pendapatan maupun belanja sebagian besar terpenuhi dengan baik bahkan pada sisi pendapatan. Untuk itu FPKB mengucapkan terimakasih dan memberikan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada saudara bupati dan seluruh jajaran pemerintah daerah atas kerja kerasnya. FPKB juga bersyukur serta memberi penghargaan yang tinggi kepada saudara bupati dan seluruh jajarannya, karena LHP atas Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Temanggung mendapatkan opini WTP (Wajar Tanpa Penecualian) untuk yang ke sepuluh kalinya secara berturut-turut. Hal ini merupakan prestasi yang patut kita syukuri dan perlu dijaga dan sebagai modal serta motivasi bagi Pemerintah Daerah agar kedepan bisa menjadi lebih baik.

Sidang Dewan dan Hadirin Yang terhormat

Setelah membaca dan mencermati Rancangan peraturan Daerah Kabupaten Temanggung tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2021, maka FPKB dapat memberikan beberapa tanggapan dan masukan sebagai berikut :

1. Terkait dengan PAD yang berasal dari Dinas Kesehatan yang hanya terealisasi sebesar Rp. 60.912.000, (Enam puluh juta sembilan ratus dua belas ribu rupiah) atau 24,36% dari anggaran yang ditetapkan sebesar Rp. 250.000.000, (Dua ratus lima puluh juta rupiah), padahal pada pos yang lain menunjukkan angka realisasi yang tinggi. Untuk itu Mohon penjelasan!
2. Selain itu beberapa kegiatan dari Dinas Kesehatan juga banyak yang tidak terserap, diantaranya :
 - 1) Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi penduduk terdampak krisis kesehatan akibat bencana dan berpotensi bencana
 - 2) Pelaksanaan Akreditasi Fasilitas Kesehatan di kabupaten.
3. Pendapatan BUMD RSUD yang mencapai Rp. 226.317.952.735, (Dua ratus dua puluh enam milyar tiga ratus tujuh belas juta sembilan ratus lima puluh dua ribu tujuh ratus tiga puluh lima rupiah) atau 167,64% dari anggaran yang ditetapkan sebesar Rp. 135.000.000.000, (Seratus tiga puluh lima milyar rupiah) patut diapresiasi. Namun demikian realisasi belanjannya masih rendah, utamanya pada pos belanja modal tanah. Mohon penjelasannya!

4. Terkait pendapatan pada Dinas Koperasi khususnya pada pos lain-lain PAD yang sah realisasinya juga sangat rendah, dimana pada pos tersebut dianggarkan sebesar Rp. 3.000.000.000, (Tiga milyar rupiah) namun hanya terealisasi Rp. 344.933, (Tiga ratus empat puluh empat juta sembilan ratus tiga puluh tiga ribu rupiah) atau hanya 11,50%. Mohon penjelasannya!
5. Mohon penjelasan terkait kegiatan koordinasi, sinkronisasi dan pelaksanaan kebijakan percepatan pengembangan penyebaran dan perwilayahan industri yang hanya terserap untuk belanja operasi sebesar 33,72% sementara belanja modalnya 0%.
6. Terkait dengan 2 paket pekerjaan pembangunan Puskesmas Bulu & Puskesmas Jumo yang dibiayai dengan DAK kesehatan tahun 2021, dimana untuk Puskesmas Bulu dan Puskesmas Juma masing-masing dengan Pagu anggaran Rp. 9.900.000.000, (Sembilan milyar sembilan ratus juta rupiah) Yang telah diserahkan terimakan pada tanggal 3 dan 4 Desember 2021, untuk itu di dalam masa perawatan ini kami melihat kualitas hasil pekerjaannya kurang bagus, seperti di Puskesmas Bulu dimana dinding WC lantai 2 banyak yang bocor, Wastafel beulm bisa difungsikan dengan baik, Saluran drainase dan saluran irigasi tidak berfungsi dengan baik terutama saat hujan sehingga air masuk halaman belakang puskesmas, serta tempat parkir ambulance tidak memenuhi standar. Begitupun di Puskesmas Jumo terdapat atap ruang pertemuan/Aula yang bocor, WC lantai 1 dan lantai 2 tidak dapat difungsikan, wastafel juga tidak berfungsi dengan baik. Untuk itu, FPKB secara tegas mohon agar anggaran rentensi yang 5% agar tidak dicairkan terlebih dahulu sebelum FHO atau pencairan tahap ke-dua ini benar-benar sempurna.
7. Terkait dengan temuan BPK tentang penyertaan modal pada BUMD khususnya Perumda Aneka Usaha yang tidak didukung oleh Kewajaran Laporan Keuangan bahkan pengelolaan yang bermasalah sejak lama, FPKB mohon penjelasan tindak lanjut terhadap kebijakan yang akan diambil bagaimana.

Sidang Dewan dan Hadirin Yang Terhormat

Demikian Pandangan Umum Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa DPRD Kabupaten Temanggung dengan harapan dapat menjadi masukan yang bermanfaat. Atas segala kesalahan dan kekhilafan kami mohon maaf yang sebesar-besarnya.

Wallahul Muwafiq ila aqwamithoriq

Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Temanggung, 23 Juni 2022

Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa DPRD Kabupaten Temanggung Ketua
M. Mahzum ditandatangani.

Kepada Saudara Dedi Hariyadi, S.E. selaku juru bicara Fraksi partai Kebangkitan Bangsa kami sampaikan terima kasih.

Selanjutnya kami berikan kesempatan kepada Juru bicara Fraksi Nusantara untuk menyampaikan pandangan umumnya. ----- Stop

PANDANGAN UMUM FRAKSI NUSANTARA

OLEH ISNARWANDI, S.Ag

PANDANGAN UMUM FRAKSI NUSANTARA TERHADAP RANCANGAN PERATURAN DAERAH TENTANG PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN TEMANGGUNG TAHUN ANGGARAN 2021

Assamualaikum warahmatullahi wabarakatuh

Yth. Saudara Ketua Rapat dan Para Wakil Ketua DPRD Kabupaten Temanggung,

Yth. Saudara Bupati Temanggung,

Yth. Saudara-Saudara Anggota Forum Koordinasi Pimpinan Daerah atau yang mewakili,

Yth. Saudara Sekretaris Daerah dan Para Asisten Sekretaris Daerah,

Yth. Saudara Para Kepala SKPD, Saudara Para Pimpinan BUMD dan Para Kepala Instansi Vertikal,

Yth. Saudara Para Kepala Bagian di Lingkungan Sekretariat Daerah dan Saudara Para Camat se Kabupaten Temanggung,

Yth. Para Kolega Anggota Dewan,

Yth. Kawan-Kawan Seperjuangan Pers, Kawan-Kawan LSM, Pemerhati Dewan dan hadirin yang berbahagia.

Puji syukur marilah kita panjatkan hadzirat-Nya atas limpahan rahmat, taufiq, hidayah dan innayah-Nya sehingga kita dapat menyelenggarakan agenda konstitusional Rapat Paripurna Dewan hari ini dengan agenda Penyampaian Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Temanggung Tahun Anggaran 2021 dalam keadaan sehat wal'afiat serta damai dan sejahtera.

Rapat Paripurna Dewan Yth.

Mengawali Pandangan Umum Fraksi Nusantara ini, kami menyampaikan apresiasinya atas Penghargaan yang diterima oleh Pemerintah Daerah atas kerja keras dan upaya maksimal yang dilakukan sehingga berhasil mempertahankan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari BPK RI terhadap Laporan Hasil Pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Temanggung tahun 2021, dan untuk kali ini WTP yang

ke Sepuluh kalinya secara berturut-turut. Ini menunjukkan predikat yang baik yang dicapai Pemerintah Kabupaten Temanggung.

Hal tersebut merupakan prestasi yang patut kita syukuri dan perlu dijaga dan sebagai modal serta motivasi bagi Pemerintah Daerah agar kedepan bisa menjadi lebih baik. Namun Pemerintah Daerah jangan sampai terlena mengingat masih banyak hal-hal yang harus ditingkatkan dan memperbaiki hal-hal yang belum maksimal. APBD tidak hanya diukur dengan penerapan standart akuntansi pemerintah berbasis akrual saja, namun diukur juga dari efisiensi dan efektifitasnya dalam belanja daerah. Untuk itu kami berharap agar Pemerintah Daerah melakukan evaluasi secara menyeluruh terkait aspek APBD pada periode yang akan datang guna meningkatkan pencapaian pembangunan secara merata di Kabupaten Temanggung, dan kami berharap Pemerintah Daerah mampu berlaku bijak dalam menggunakan anggaran yang ada dan semakin giat untuk meningkatkan dan menggali PAD dengan melakukan terobosan-terobosan yang efektif dan efisien.

Namun demikian tanpa mengurangi penghargaan tersebut diatas, Fraksi Nusantara menyampaikan pandangan umumnya yang berupa pendapat dan pertanyaan sebagai berikut :

1. Terkait jumlah tenaga supporting staff (SS) di Kabupaten Temanggung yang jumlahnya lebih dari 2.000 orang yang tersebar di seluruh OPD dengan jumlah yang berbeda sesuai dengan kebutuhan, sebenarnya sangat membantu PNS mengingat jumlah PNS di Kabupaten Temanggung yang terbatas. Namun dengan adanya kebijakan dari MENPAN RB pada tanggal 28 November 2023 akan dihapuskan dan dari 2.000 orang tenaga SS akan terancam dikeluarkan. Fraksi kami menanyakan, kebijakan apa yang akan diambil oleh Pemerintah Daerah dalam menuntaskan permasalahan ini? Mohon penjelasan!
2. Pemberian bantuan pupuk pada petani tembakau selalu mengalami keterlambatan, harusnya hal ini sudah bisa di prediksi sebelumnya kapan waktu tanam tembakau dimulai dan bisa diantisipasi karena sangat merugikan petani. Lalu bagaimana langkah Pemerintah Daerah mengatasi masalah ini?
Kecuali hal tersebut diatas, para petani juga mengeluhkan pupuk subsidi yang menghilang di pasaran. Selain pupuk subsidi, pupuk non subsidi pun susah didapatkan di agen-agen distributor pupuk. Mohon tanggapannya!
3. Permasalahan pada kegiatan pekerjaan pembangunan infrastruktur dibidang pembangunan gedung dan pembangunan jalan hampir disetiap tahun mengalami permasalahan yang sama, diantaranya mutu dari hasil pekerjaan yang kurang baik. Sebagai contoh antara lain pada beberapa pembangunan gedung puskesmas yang

mungkin telah disampaikan fraksi lain, masih ditemukan adanya kamar mandi yang belum berfungsi, wastafel yang belum bisa digunakan, atap bocor, dll.

Hal yang lain pada pekerjaan pembangunan jalan juga banyak ditemukan beberapa aspal yang mengelupas karena derasnya air hujan yang masuk ke badan jalan disebabkan drainase yang tidak berfungsi atau bahkan tidak ada sama sekali.

Fraksi kami memahami bahwa memang benar, tahapan dari semua pekerjaan tersebut rata-rata sudah dilakukan dan menurut kaidah pemeriksaan tidak ada yang dilanggar, dan ada masa pemeliharaan 6 bulan setelahnya. Namun alangkah baiknya jika semua proses pekerjaan tersebut dilakukan secara tepat perencanaan, tepat waktu, dan tepat mutu agar hasil dari pembangunan tersebut dapat segera dirasakan oleh masyarakat. Mohon tanggapan!

4. Akhir-akhir ini banyak kasus PMK (Penyakit Mulut dan Kuku) pada hewan ternak di Kabupaten Temanggung. Seperti apa upaya Pemerintah Daerah dalam menangani kasus tersebut?
5. Menjelang Hari Raya Idul Adha, proses jual beli hewan qurban memang menjadi kebutuhan. Sedangkan pasar-pasar hewan di Kabupaten Temanggung di tutup sampai tanggal 22 Juni tahun 2022, penutupan pasar ini apakah akan ada perpanjangan atau tidak? Karena dilapangan terjadi anjuran Pemerintah agar pasar hewan tidak digunakan meskipun pada hari pasaran, namun masyarakat tetap berjualan tidak di dalam pasar tetapi berjualan di luar pasar sehingga mengganggu lalu lintas jalan. Mohon tanggapan!

Saudara Ketua dan Sidang Dewan Yth.

Demikian Pendapat Fraksi Nusantara, kurang lebihnya mohon maaf yang setulus-tulusnya, Wabillahi Taufiq Walhidayah Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Temanggung, 23 Juni 2022 Fraksi Nusantara Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Temanggung Ketua Isnarwandi Sekretaris Umi Fadillah masing-masing ditandatangani.

Kepada Bapak Isnarwandi, S.Ag. selaku Juru Bicara Fraksi Nusantara disampaikan terima kasih.

Selanjutnya kami berikan kesempatan kepada Juru bicara Fraksi Golkar untuk menyampaikan pandangan umumnya. ----- Stop

PANDANGAN UMUM FRAKSI GOLKAR OLEH DWI LIDA WATI, SH.,M.H

PEMANDANGAN UMUM FRAKSI PARTAI GOLKAR TERHADAP RAPERDA TENTANG
PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN APBD KAB. TEMANGGUNG TA 2021

Bismillahirrahmanirrahim

Assalamu'alaikum Warohmatullahi Wabarokatuh

Salam sejahtera bagi kita sekalian

Yang kami hormati :

Ketua rapat dan para Wakil ketua DPRD

Saudara Bupati dan Wakil Bupati Temanggung

Para anggota Forum Koordinasi Pimpinan Daerah atau yang mewakili Saudara Sekda, para Asisten Sekda, para Kepala Dinas, Kantor, Badan, Camat, Ketua KPUD dan Direktur BUMD
Para tamu undangan, rekan Pers dan segenap anggota DPRD yang berbahagia.

Sebelumnya, perkenankan pada kesempatan yang berbahagia ini, kami memanjatkan puji syukur kehadiran Allah SWT Tuhan Yang Maha Esa, atas limpahan Rahmat dan Hidayah-Nya kepada kita semua, sehingga pada saat ini kita masih diberi kesempatan, menghadiri Rapat Paripurna dalam keadaan sehat wal'afiat tanpa halangan yang merintang.

Sidang Dewan dan Para Hadirin Yang Berbahagia

Pada kesempatan ini kami mengucapkan terima kasih kepada pimpinan rapat yang telah memberikan kesempatan kepada kami untuk menyampaikan Pemandangan Umum Fraksi Partai Golkar terhadap Penyampaian Raperda tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kab. Temanggung Tahun Anggaran 2021.

Dan pada kesempatan ini, kami Fraksi Partai Golkar menyampaikan apresiasi yang sebesar-besarnya kepada Pemerintah Daerah atas diterimanya hasil audit BPK-RI dengan opini " Wajar Tanpa Pengecualian / WTP " yang ke-10, namun demikian tidak berarti bahwa semua laporan keuangan telah sempurna tanpa kesalahan. Laporan keuangan daerah adalah proses dinamis yang terus menerus perlu perbaikan dan peningkatan. Berkaitan dengan hal tersebut, FPG berharap Pemerintah Daerah agar menindaklanjuti rekomendasi-rekomendasi BPK-RI sesuai rencana aksi yang telah disepakati.

Selain hal tersebut, bersama ini pula Fraksi Partai Golkar setelah mencermati beberapa dokumen LPPD dan hasil audit BPK-RI ada beberapa catatan dan pertanyaan yang perlu kami sampaikan, antara lain sebagai berikut:

1. Temuan BPK-RI atas beberapa Pembangunan Infrastruktur disebutkan adanya kelebihan pembayaran atau kurang volume, menurut kami hal ini terjadi karena Pemda dalam memilih konsultan pengawas kurang selektif. Mohon tanggapannya.
2. Belanja bantuan sosial hanya terealisasi sebesar Rp. 2,97 M atau 17%, mengapa demikian? Mohon penjelasan.
3. Nilai Ekuitas atau tambahan kekayaan bersih selama tahun 2021 sebesar Rp. 214,9M atau $\pm 11\%$ dari APBD, pertanyaan berapa nilai ideal ekuitasnya?

4. Realisasi sewa Barang Milik Daerah (Kios, Los Pasar Daerah) sebesar 11,5% dari anggaran sebesar Rp.3M, mengapa demikian?
5. Mengapa terjadi piutang Retribusi Menara/Tower sebesar Rp.430,4juta, padahal perusahaan yang bergerak di bidang tersebut bisa dikategorikan perusahaan yang bonafit. Mohon penjelasannya.
6. Kemudian tentang kendaraan dinas yang dipakai oleh orang umum yang tidak bertanggung jawab, dimana menjalankan kendaraan dengan kecepatan tinggi bahkan sempat terjadi tabrak lari di daerah Kedu dan tidak ada tanggung jawabnya sedangkan dari pihak Pemda juga tidak pernah ada klarifikasi. Mohon tanggapannya.

Sidang Dewan dan Para Hadirin Yang Berbahagia

Demikian Pemandangan Umum Fraksi Partai Golkar, terima kasih atas perhatiannya dan mohon maaf atas segala kekurangannya.

Akhirulkholaam, Wabillahi taufiq wal Hidayah.

Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Temanggung, 23 Juni 2022 Fraksi Partai Golkar DPRD Kabupaten Temanggung Ketua Slamet, S.E. Sekretaris Ishadi masing-masing ditandatangani.

Kepada Ibu Dwi Linda Wati, S.H., M.H. selaku Juru Bicara Fraksi Partai Golkar disampaikan terima kasih.

Selanjutnya kami berikan kesempatan kepada Juru bicara Fraksi Partai Persatuan Pembangunan untuk menyampaikan pandangan umumnya. ----- Stop

PANDANGAN UMUM FRAKSI PPP OLEH ROCHMAT FAUZI TH
--

PANDANGAN UMUM FRAKSI PARTAI PERSATUAN PEMBANGUNAN TERHADAP RAPERDA PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN APBD KABUPATEN TEMANGGUNG TAHUN ANGGARAN 2021 DISAMPAIKAN DALAM RAPAT PARIPURNA DPRD KABUPATEN TEMANGGUNG FRAKSI PARTAI PERSATUAN PEMBANGUNAN DPRD KABUPATEN TEMANGGUNG

Assalammu'alaikum Wr. Wb.

Selamat siang, salam sejahtera buat kita semua

Yang terhormat:

Pimpinan Rapat dan Para Wakil Ketua DPRD

Saudara Bupati Temanggung dan Wakil Bupati Temanggung

Para Anggota Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkompinda) atau yang mewakilinya

Sekretaris Daerah dan Jajaran Eksekutif di Lingkungan Sekretariat Daerah

Kepala Dinas, Kepala Badan, Kepala Kantor dan Instansi Pemerintah.

Para Camat se kabupaten Temanggung

Sekretaris DPRD dan jajaran sekretariat DPRD

Rekan-rekan Anggota DPRD, Direktur BUMD, Insan Pers, Pemerhati

Rapat Dewan dan Hadirin Yang Terhormat.

Puji syukur kita panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa, Allah SWT atas limpahan rahmat dan hidayahNya sehingga kita dapat mengikuti rapat paripurna pada hari ini tanpa halangan suatu apapun. Shalawat dan salam semoga senantiasa terlimpahkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad SAW beserta keluarga, para sahabat, dan kita sekalian sebagai umatnya.

Ucapan terimakasih kami sampaikan kepada pimpinan rapat yang telah memberikan waktu kepada kami untuk menyampaikan pandangan umum fraksi. Ucapan terima kasih dan apresiasi juga kami sampaikan kepada seluruh anggota DPRD Kabupaten Temanggung yang dapat hadir pada Rapat Paripurna kali ini.

Rapat Dewan dan Hadirin Yang Terhormat

Beberapa bulan yang lalu tepatnya pada bulan maret 2022 kita sudah memberikan beberapa catatan berkaitan dengan Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban Bupati Temanggung 2021. Beberapa point penting dalam rangka perbaikan sudah kami sampaikan. Dan hari ini kami diberi kesempatan menyampaikan pandangan umum berkaitan dengan raperda tentang Pertanggungjawaban pelaksanaan APBD 2021. Dimana raperda itu merupakan bentuk penyampaian kinerja pengelolaan keuangan pemerintah Kabupaten yang sudah diaudit BPK. Secara umum realisasi APBD 2021 cukup menggembirakan, target pendapatan dan belanja sebagian besar terpenuhi bahkan melampaui target meskipun pandemi Covid-19 ditahun 2021 belum berakhir.

Sebagaimana disampaikan Saudara Bupati dalam pengantarnya realisasi Pendapatan Daerah 2021 sebesar Rp.1.971.005.990.029,00. Realisasi Belanja Daerah 2021 sebesar Rp 1.887.969.167.294,00.

Untuk itu Fraksi Partai Persatuan Pembangunan menyampaikan terima kasih dan memberikan apresiasi kepada Saudara Bupati dan jajaran Pemerintah Daerah atas kerja kerasnya. Dan perlu kita syukuri bersama karena LHP BPK atas Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Temanggung tahun 2021 mendapat opini WTP untuk yang ke sepuluh kalinya berturut-turut. Ini menunjukkan bahwa laporan hasil pemeriksaan atas laporan keuangan telah disajikan dengan standar akuntansi pemerintahan. Hal ini merupakan prestasi yang perlu dipertahankan agar Pelaksanaan APBD kedepan lebih baik.

Namun demikian, tidak berarti bahwa semua laporan keuangan telah sempurna tanpa kesalahan. Laporan keuangan daerah adalah proses dinamis yang terus-menerus perlu perbaikan dan peningkatan. Untuk itu FPPP juga perlu memberikan catatan. Khususnya terkait beberapa program kegiatan yang belum sesuai target, juga yang menjadi catatan dan rekomendasi BPK terutama terkait dengan Sistem Pengendalian Internal dalam upaya penyempurnaan Raperda dimaksud dengan harapan adanya peningkatan dan penyempurnaan dimasa yang akan datang.

Rapat Dewan dan Hadirin Yang Terhormat

Setelah membaca dan mencermati Raperda yang telah disampaikan pengantarnya oleh saudara Bupati terkait Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Temanggung Tahun 2021, maka ada beberapa hal yang perlu kami sampaikan, diantaranya adalah :

1. Ada perbedaan laporan keuangan daerah dan selisih yang cukup signifikan antara LKPJ Bupati 2021 dan LPP APBD 2021 yang telah disampaikan sebagai berikut :

No	Uraian	LKPJ 2021	LPP APBD 2021	Selisih
1.	Pendapatan	Rp.1.970.984.143.681	Rp.1.971.005.990.029	Rp. 21.846.348
2.	Belanja	Rp.1.877.946.263.818	Rp.1.877.969.167.294	Rp. 22.903.476
3.	Surplus/Defisit	Rp. 93.037.822,863	Rp. 93.036.822.735	Rp. 1.000.128
4.	Pembiayaan Netto	Rp. 169.441.682.648	Rp. 161.211.637.352	Rp. 8.230.045.296
5.	Silpa	Rp. 262.479.652.511	Rp. 254.258.460.087	Rp. 8.221.192.323

Dengan adanya perbedaan laporan keuangan daerah yang disajikan dalam LKPJ Bupati 2021 dengan LPP APBD hasil audit BPK Jateng, untuk itu FPPP mohon penjelasan hal ini mengapa terjadi.

2. Adanya Surplus yang cukup besar di tahun 2021 ini, yaitu sebesar Rp 93.036.822.736 atau sama dengan 4,7% dibanding realisasi pendapatan dan jauh lebih besar dari tahun 2020 menunjukkan sebagian besar pendapatan memenuhi target bahkan melampaui. Namun demikian hal ini juga menunjukkan keterserapan anggaran yang kurang maksimal atau optimal. Untuk itu Fraksi Partai Persatuan Pembangunan berharap agar perencanaan kedepan harus lebih baik.
3. Kenaikan aset Pemerintah Kabupaten Temanggung tahun 2021 sebesar 5,3% menjadi Rp 3,352 triliun cukup menggembirakan, namun dibandingkan dengan turunnya aset di tahun 2020 dari tahun 2019 sebesar Rp 3,240 triliun, Kenaikan ini masih relative kecil.

4. SiLPA yang cukup besar harus menjadi perhatian karena :

- Dilihat dari tahun ketahun SiLPA yang berjalan semakin besar, hal ini menunjukkan ketidakcermatan pemerintah daerah dalam menyusun perencanaan anggaran dan melakukan kegiatan, sehingga ada kesan yang kurang bagus.
- SiLPA tahun berjalan yang semakin besar akan menjadi sorotan Pemerintah Pusat (Kemenkeu) melalui Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD). Dan hal ini bisa tidak menguntungkan bagi Pemerintah Daerah

5. Terkait Sistem Pengendalian Internal dan Kepatuhan Terhadap Peraturan Perundang-undangan, dimana dari hasil uji petik yang dilakukan BPK atas realisasi belanja modal bangunan dan gedung serta belanja modal jalan, irigasi dan jaringan masih ditemukan 19 (Sembilan belas) paket pekerjaan pada DKK, RSUD dan DPUPR terdapat kekurangan volume sebesar 900 juta rupiah lebih. Dan 14 paket pekerjaan pada DPUPR yang tidak sesuai dengan spesifikasi teknis sebesar 2,649 Milyar Rupiah lebih.

Hal ini menunjukkan kurang dan lemahnya pengawasan serta pengendalian terhadap pelaksanaan pekerjaan dan progress kegiatan. Untuk itu FPPP berharap agar kedepan perlu lebih ditingkatkan komunikasi dan koordinasi antar Dinas Teknis, Konsultan Perencana dan Konsultan Pengawas. Dan juga perlu evaluasi berkala pada setiap paket pekerjaan.

Rapat Dewan dan Hadirin Yang Kami Hormati

Demikian Pandangan Umum Fraksi Partai Persatuan Pembangunan semoga ada bermanfaat, kurang lebih dalam penyampaian kami mohon maaf yang sebesar-besarnya.
Temanggung, 23 Juni 2022 Fraksi Partai Persatuan Pembangunan Dprd Kabupaten Temanggung Ketua Rochmat Fauzi Sekretaris Ahmad Syarif Yahya keduanya ditandatangani.

Wallahul Muwafiq ila aqwamithoriq

Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Kepada Bapak Rochmat Fauzi TH selaku Juru Bicara Fraksi Partai Persatuan Pembangunan disampaikan terima kasih.

Terakhir kami berikan kesempatan kepada Juru bicara Fraksi PAN Berkeadilan untuk menyampaikan pandangan umumnya. ----- Stop.

PANDANGAN UMUM FRAKSI PAN BERKEADILAN

OLEH BEJO TURSIYAM, S.E

PEMANDANGAN UMUM PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN APBD TAHUN ANGGARAN 2021

Yang kami Hormati, Pimpinan rapat dan para Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kab Temanggung

Yang kami Hormati, Saudara Bupati dan Wakil Bupati

Yang kami Hormati, Jajaran Forum Koordinasi Pimpinan Daerah

Yang kami Hormati, Saudara Sekda dan para Asisten Sekda, Kepala Badan, Kepala Dinas, Para Camat di lingkungan Pemerintah Kabupaten Temanggung

Yang kami Hormati Jajaran direktur BUMD Ketua KPUD Temanggung

Yang kami cintai rekan-rekan Anggota Dewan, jajaran Setwan serta rekan-rekan wartawan dan hadirin yang berbahagia.

Alhamdulillah robbil 'alamin, segala puji dan syukur kita panjatkan kehadiran Allah SWT, atas rahmat dan hidayah-Nya, kita dapat menghadiri Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Temanggung pada hari ini dalam keadaan sehat wal 'afiat.

Sholawat serta salam kita sampaikan kepada Nabi Muhammad SAW, beserta keluarga, sahabat, para pengikut-Nya dan semoga kita selalu menjalankan apa yg menjadi sunah - sunah nya. Amin

Selanjutnya, perkenalkanlah kami menyampaikan ucapan terima kasih, kepada Pimpinan Rapat, yang telah memberi kesempatan kepada Fraksi PAN Berkeadilan untuk menyampaikan Pemandangan Umum terhadap Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2021 dalam forum yang terhormat ini.

Sidang Dewan yang terhormat dan hadirin yang berbahagia,

Mengikuti penjelasan Bupati Temanggung terhadap Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021, maka dalam kesempatan ini Fraksi PAN Berkeadilan menyampaikan Pemandangan Umum, yaitu APBD mempunyai peran strategis untuk mendukung aktifitas pemerintah Daerah dalam menjalankan fungsinya baik dalam menjunjung pelayanan publik, Implementasi berbagai macam regulasi, meningkatkan pembangunan di berbagai sektor dan untuk pemberdayaan masyarakat. APBD juga merupakan instrumen teknis dari idealisme pembangunan yang diwujudkan oleh Pemerintah Daerah yang muaranya adalah peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Berkaitan laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2021 tentunya Fraksi PAN Berkeadilan yang memiliki salah satu tugas mengawasi jalannya Pemerintahan secara bermartabat dan proporsional, memandang bahwa laporan tersebut diatas menjadi sangat penting mendapatkan perhatian kami, hal ini dimaksudkan supaya dalam menjalankan tugas pemerintahan menjadi lebih baik. Fraksi PAN Berkeadilan menyampaikan penghargaan dan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada Saudara Bupati dan seluruh jajaran OPD Pemerintah Kabupaten Temanggung atas diraihnya Predikat Wajar Tanpa Pengecualian yang ke-10 dari Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Temanggung Tahun Anggaran 2021, dimana opini ini merupakan opini tertinggi dari standar pengelolaan keuangan daerah. Adapun terkait beberapa temuan yang menjadi catatan untuk Pemerintah Daerah dalam LHP yang harus segera ditindaklanjuti, kami mendorong agar seluruh rekomendasi yang dicantumkan dalam Laporan Hasil Pemeriksaan BPK atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Tahun Anggaran 2021 segera ditindaklanjuti dengan serius agar tidak mempengaruhi opini yang diberikan BPK pada tahun depan.

Hadirin sidang paripurna yang terhormat,

Berikut catatan-catatan dan masukan yang diberikan Fraksi PAN Berkeadilan untuk melengkapi Laporan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2021 :

1. Opini "WTP" memang mengandung maksud bahwa laporan keuangan dianggap telah memberikan informasi yang bebas dari salah saji material. Auditor meyakini bahwa berdasarkan bukti bukti audit yang dikumpulkan, pemerintah dianggap telah menyelenggarakan prinsip akuntansi yang berlaku umum dengan baik, dan walaupun ada kesalahan, kesalahannya dianggap tidak material dan tidak berpengaruh keputusan. signifikan terhadap pengambilan keputusan. Untuk itu diharapkan dengan opini 'WTP' ini menjadi pemicu pemerintah Kabupaten Temanggung untuk tindak lanjuti dengan mencapai kinerja yang lebih baik.
2. Berdasarkan Surplus dan Pembiayaan Netto ada Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun 2021 sebesar Rp.254.248.460.087,00 (Dua ratus lima puluh empat miliar, dua ratus empat puluh delapan juta, empat ratus enam puluh ribu, delapan puluh tujuh rupiah). Saldo Anggaran Lebih ini merupakan jumlah saldo yang berasal dari akumulasi SILPA tahun-tahun anggaran sebelumnya dan tahun berjalan serta penyesuaian lain yang diperkenankan. Dan ternyata pada Saldo Akhir Kas berbeda dengan SILPA Karena terdapat utang pajak per 31 Desember 2021. Maka perlu adanya penjelasan apakah perbedaan antara saldo akhir kas dengan SILPA hanya karena utang pajak atau juga karena kinerja yang belum baik? Mohon Tanggapannya

3. kami meminta kepada Pemerintah Daerah untuk segera menindaklanjuti catatan dan rekomendasi BPK, kemudian dapat dijadikan sebagai bahan kajian dan sumbangsih konsep berpikir dalam rangka perbaikan kinerja dan tugas-tugas pemerintah daerah kabupaten Temanggung pada tahun-tahun mendatang. Kami juga berharap kepada seluruh OPD agar orientasi anggaran belanja untuk pemenuhan kebutuhan masyarakat harus menjadi Prioritas dibanding belanja untuk pemenuhan kebutuhan birokrasi.
4. Terhadap sektor Pendapatan Asli Daerah (PAD) Fraksi PAN Berkeadilan mendorong Pemerintah khususnya kepada seluruh SKPD untuk melakukan upaya secara intensifikasi dan ekstensifikasi serta melakukan inovasi, sehingga dapat dikonversi menjadi PAD. Karena kami memandang bahwa PAD masih belum memperlihatkan kenaikan yang signifikan. Upaya secara kolektif dari seluruh OPD yang ada mutlak diperlukan. Mohon Tanggapannya!
5. Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI masih menemukan catatan masalah terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Tahun Anggaran 2021, salah satunya adalah adanya kelebihan pembayaran terhadap delapan paket pekerjaan pada DPUPR, Dinbudpar, Dan Dindikpora sebesar Rp. 578.531.000,- . Terhadap catatan tersebut, Fraksi PAN Berkeadilan berharap agar Pemerintah Daerah dapat mengevaluasi dan memperbaiki diri, baik dari sisi optimalisasi pengawasan maupun dari sisi pengendalian atas pelaksanaan kegiatan, sehingga uang rakyat yang digunakan untuk pembangunan benar-benar dapat dipertanggungjawabkan. Mohon Tanggapannya!
6. Fraksi PAN Berkeadilan cukup kecewa melihat kualitas bangunan Gedung Puskesmas Bulu dan Puskesmas Jumo yang sedemikian buruk, sehingga dalam waktu kurang dari 6 bulan sejak bangunan diserahterimakan ada beberapa bagian gedung yang tidak bisa digunakan. Mulai dari kebocoran atap, kebocoran lain dan kerusakan kamar mandi, limbah yang dibuang disaluran terbuka, hingga perencanaan bangunan yang tidak standar seperti tidak adanya Ipal, penempatan stop kontak dibawah wastafel, desain lantai kamar mandi yang tidak dibuat miring sehingga air menggenang, juga beberapa temuan lain yang membuat berbagai spekulasi dan pertanyaan muncul, mengapa bangunan dengan kualitas sebegitu buruknya bisa diterima oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Temanggung. Berkaitan dengan hal ini, kami memohon penjelasan kepada saudara Bupati tentang perencanaan, fungsi pengawasan dan pengendalian kegiatan, juga alasan mengapa Pemerintah Daerah memaksakan diri untuk menerima Bangunan Gedung yang

bahkan terdapat titik yang tidak dapat digunakan sejak awal diserahterimakan tersebut. Mohon Tanggapannya!

Pimpinan Rapat Paripurna Dewan yang kami hormati,

Demikian Pandangan Umum Fraksi kami, sebagai penutup Fraksi PAN Berkeadilan ingin menggarisbawahi bahwa akuntabilitas dan transparansi harus menjadi “ruh” dari setiap upaya untuk melakukan perubahan dan pembenahan yang lebih baik dan optimal, termasuk dalam perbaikan dan pembenahan manajemen pengelolaan keuangan daerah.

Dengan transparansi dan akuntabilitas tersebut kami berharap, akan dapat meminimalisir potensi penyimpangan dan kebocoran APBD yang berdampak pada rendahnya tingkat kesejahteraan masyarakat. Harapan kami, transparansi dan akuntabilitas kinerja keuangan daerah akan berdampak positif terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat. akhirnya kami menghaturkan terima kasih atas perhatiannya dan kami menyampaikan permohonan maaf jika dalam Pandangan Fraksi PAN Berkeadilan terdapat hal-hal yang kurang berkenan. Semoga Pandangan Umum dan masukan Fraksi kami dapat diterima guna menyempurnakan kegiatan Pembangunan di Kabupaten Temanggung.

Wassalamu’alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Temanggung, 23 Juni 2022 Fraksi PAN Berkeadilan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Temanggung Ketua H. Badrun Mustofa, S.Pd. Sekretaris Bejo Tursiyam, S.E. keduanya ditandatangani.

Kepada saudara Bapak Bejo Tursiyam, S.E. selaku Juru Bicara Fraksi PAN Berkeadilan disampaikan terima kasih.

Rapat DPRD dan hadirin yang terhormat.

Demikian tadi telah disampaikan Pandangan Umum Fraksi-fraksi DPRD Kabupaten Temanggung terhadap Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten Temanggung Tahun Anggaran 2021.

Dari Pandangan Umum yang telah disampaikan, terdapat beberapa pertanyaan dan permintaan penjelasan kepada Bupati Temanggung.

Selanjutnya untuk memberikan waktu kepada Saudara Bupati Temanggung menyusun jawaban dan/atau penjelasannya, maka kami usulkan Rapat Paripurna diskors selama 90 menit.

Pimpinan Rapat:

Apakah usul kami dapat disetujui ?

Rapat DPRD:

Dapat!

Pimpinan Rapat:

(Ketuk palu 1 kali) Terima kasih

Dengan demikian rapat kita skors selama 90 menit dan kita lanjutkan kembali pada pukul 14.05 WIB.

SKORS

Rapat Paripurna DPRD dan hadirin yang berbahagia.

Skors kami cabut dan Rapat kami buka kembali ----- ketuk palu 1 kali.
Selanjutnya untuk memberikan tanggapan dan/atau jawaban atas Pandangan Umum Fraksi-Fraksi DPRD, Kepada Saudara Bupati Temanggung kami persilakan.

PENJELASAN BUPATI TEMANGGUNG

OLEH H. M. AL KHADZIQ

JAWABAN BUPATI TEMANGGUNG ATAS PEMANDANGAN UMUM FRAKSI DPRD MENGENAI RANCANGAN PERATURAN DAERAH TENTANG PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN APBD TAHUN ANGGARAN 2022

Assalamu'alaikum warohmatullohi wabarokatuh.

Selamat siang dan Salam sejahtera untuk kita semua,

Yang Saya hormati, Saudara Ketua, para Wakil Ketua dan seluruh Anggota DPRD Kabupaten Temanggung,

Bapak-bapak Anggota Forum Komunikasi Pimpinan Daerah,

Sdr. Wakil Bupati,

Sdr. Sekretaris Daerah, Para Staf Ahli Bupati, Para Asisten Sekda, Para Pimpinan Perangkat Daerah, Para Camat, dan Para Direktur BUMD yang saya hormati,

Para tamu undangan, pemerhati Dewan, rekan-rekan pers, serta hadirin yang berbahagia,

Pada kesempatan ini Saya sampaikan terima kasih kepada fraksi-fraksi DPRD atas perhatian, masukan, dan sarannya. Selanjutnya atas saran, masukan, dan permintaan penjelasan dari fraksi-fraksi DPRD, kami sampaikan penjelasan sebagai berikut

I. FRAKSI PARTAI GERINDRA

1. Terkait dengan usaha yang dilakukan untuk menaikkan pos pendapatan dari DAK dan DAU dapat kami sampaikan bahwa penetapan dana transfer dari Pemerintah Pusat tersebut yang bersifat umum menggunakan formula berdasarkan beberapa indikator data dasar daerah, sedangkan yang bersifat khusus berdasarkan ketersediaan menu yang ada pada setiap tahun anggaran. Berkaitan dengan hal tersebut kami selalu mengupayakan peningkatannya. Saat ini proses usulan melalui menu aplikasi Krisna, dimana Pemerintah Daerah mengkoordinasikan semua OPD

yang ada menunya di kementerian-kementerian teknis untuk dapat di optimalisasikan dan juga dapat di sinkronisasikan dengan RKPD Kabupaten Temanggung.

2. Berkaitan dengan beberapa temuan dari hasil Pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan, menjadi komitmen kami untuk selalu menindaklanjuti sesuai dengan rekomendasi yang diberikan. Selain itu tindaklanjut yang dilakukan akan dipantau progresnya secara berkala dan yang terdekat adalah pada pemantauan tindak lanjut sampai dengan Semester I pada Bulan Juli 2022. Saat ini tindak lanjut atas rekomendasi BPK RI telah diselesaikan oleh Pemerintah Kabupaten Temanggung mencapai 98%, dimana rekomendasi pencapaian ini meduduki peringkat I (satu) di Wilayah Pemeriksaan Jateng 3 Provinsi Jawa Tengah.
3. Berkaitan dengan kegiatan pembangunan fisik gedung Puskesmas Bulu dan Puskesmas Jumo dapat kami sampaikan bahwa pada saat tahapan PHO telah dilakukan audit langsung oleh BPK melalui PDTT (Pemeriksaan Dengan Tujuan Tertentu) sehingga besaran pembayaran telah disesuaikan dengan kondisi lapangan dan volume bangunan saat dilakukan pemeriksaan tersebut. Atas kondisi saat ini masih dalam masa pemeliharaan yang menjadi tanggungjawab pelaksana pembangunan dan saat ini sedang dalam proses penyelesaiannya. Kami sependapat bahwa retensi tidak akan dicairkan sebelum perbaikan tersebut dituntaskan.
4. Opini Wajar Tanpa Pengecualian merupakan pernyataan profesional dari pemeriksa mengenai kewajaran informasi keuangan yang disajikan dalam Laporan Keuangan Pemerintah Daerah yang didasarkan pada empat kriteria, yaitu kesesuaian dengan Standar Akuntansi Pemerintahan, kecukupan pengungkapan, kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan, dan efektivitas pengendalian intern. Opini ini mengandung maksud bahwa laporan keuangan telah memberikan informasi yang bebas dari salah saji secara material, dan laporan keuangan Pemerintah Kabupaten Temanggung Tahun 2021 telah memenuhi empat kriteria tersebut.
5. Berkaitan dengan distribusi pupuk dan RDKK dapat dijelaskan bahwa RDKK sudah diajukan sesuai dengan kebutuhan petani, namun untuk Pupuk Subsidi sudah ditetapkan dari Kementerian terkait kuota untuk masing-masing daerah.
6. Terkait Piutang pada BUMD Aneka Usaha selama ini terus dilakukan penagihan serta melakukan pencadangan atas piutang tak tertagih tersebut. Sedangkan untuk pengisian Direksi akan segera dijadwalkan.
7. a. Terhadap saran untuk pengolahan sampah dari hulu sampai hilir harus diprogram dengan jelas dengan pemilahan sampah yang benar-benar terlaksana dengan baik dan dibuat master plan yang terencana, kami perhatikan.

- b. Berkaitan dengan industri sampah yang harus di planning supaya arah dan tujuan jelas serta mulai direncanakan agar bisa dimaksimalkan dan pemanfaatan limbah sampah agar bisa 0%, kami sampaikan terima kasih.
 - c. Terhadap saran terkait konsep pemberian insentif bagi desa yang bisa mengolah sampah semaksimal mungkin, kami perhatikan.
 - d. Terhadap saran terkait perbaikan manajemen pemilahan sampah dan tantangan kemajuan zaman untuk menjadikan sampah sebagai sumber energi untuk menciptakan lingkungan berkesinambungan serta sumber PAD harus ada target dan perencanaan yang jelas, kami perhatikan.
8. Adanya Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) sebesar Rp. 254.248.460.087,00 dapat dijelaskan bahwa SiLPA dimaksud terbentuk dari: lebih dari target pendapatan, efisiensi belanja, dan SiLPA terikat dari DAK, BOS, BLUD RSUD dan BLUD Puskesmas.
 9. Terkait dengan pemakaian kendaraan dinas dapat kami jelaskan bahwa telah ditindaklanjuti dengan pemeriksaan oleh Inspektorat kepada pihak-pihak terkait.

II. FRAKSI PARTAI PDI PERJUANGAN

1. Berkaitan dengan tingkat kepatuhan terhadap tindak lanjut dari rekomendasi Laporan Hasil Pemeriksaan BPK, dapat kami sampaikan bahwa sampai saat ini tindak lanjut atas rekomendasi BPK RI telah diselesaikan mencapai 98% dan capaian tersebut menduduki rangking 1 untuk tingkat Wilayah Pemeriksaan Jateng 3.
2.
 - a. Berkaitan dengan banyak ditemukan titik-titik jalan yang terkelupas sepanjang jalan Muntung Sibajak, saat ini Jalan Jumprit Sibajak masih dalam Masa Pemeliharaan Melalui Retensi.
 - b. Berkaitan dengan pemeliharaan tanaman disekitar PJU dan kabel listrik dilakukan pemangkasan rutin terhadap ranting-ranting yang mengganggu PJU dan kabel listrik. Sedangkan untuk pohon yang sudah tua dan membahayakan akan kami data dan selanjutnya dilakukan langkah-langkah yang diperlukan untuk keamanan jalan.
 - c. Berkaitan dengan hasil pekerjaan fisik yang mengalami kerusakan, dapat kami sampaikan bahwa saat ini masih dalam masa pemeliharaan yang menjadi tanggungjawab pelaksana kegiatan dan kami sependapat untuk retensi tidak akan dicairkan sebelum perbaikan tersebut dituntaskan.
3. Berkaitan dengan pembangunan puskesmas Bulu dan Puskesmas Jumo sebagaimana jawaban kami pada Fraksi Gerindra.

4. a. Berkaitan dengan kepatuhan RSUD terhadap aturan pelaporan yang tidak sesuai dengan standar akuntansi Pemerintahan, RSUD Kabupaten Temanggung telah patuh dan telah menyusun Laporan Keuangan sesuai dengan PP 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan sebagaimana OPD lain untuk dikonsolidasikan dalam Laporan Keuangan Pemda dan telah diaudit oleh BPK RI. Sebagai BLUD, RSUD Kabupaten Temanggung juga telah menyajikan Laporan Keuangan sesuai dengan PMK Nomor 217/PMK.05/2015 tentang PSAP berbasis akrual No 13 tentang Penyajian Laporan Keuangan Badan Layanan Umum (BLU) yang diaudit oleh Auditor Eksternal Kantor Akuntan Publik dengan hasil audit Wajar Tanpa Pengecualian sebagai salah satu syarat penyerahan Laporan Keuangan Pemda Kepada BPK.
- b. Terkait pelayanan di RSUD Temanggung sudah didasarkan pada standar dan prosedur operasional dan atas pelaksanaan SPO tersebut juga dilakukan evaluasi. Kami tetap berkomitmen untuk meningkatkan kualitas pelayanannya.
- c. Terkait dengan pelaksanaan mutasi baik rotasi maupun promosi dapat kami sampaikan bahwa pelaksanaannya didasarkan pada PP Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen PNS dan Peraturan Bupati Temanggung Nomor 89 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pengisian Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama, Jabatan Administrator, dan Jabatan Pengawas. Pelaksanaan Mutasi tersebut juga didasarkan pada pertimbangan kebutuhan Organisasi Perangkat Daerah, peningkatan kompetensi pegawai, dan peningkatan kinerja Perangkat Daerah dimaksud.
5. Terkait maraknya PKL yg menggunakan mobil yg parkir di tepi jalan, dapat kami sampaikan bahwa sudah melakukan himbauan dan teguran agar menggunakan kendaraan sesuai peruntukannya serta tidak berjualan di badan jalan yg dapat mengganggu lalu lintas dan membahayakan keselamatan. Kami akan mensinergikan Dinas Perhubungan, Dinas Koperasi dan Perdagangan, dan Dinas Satpol PP Damkar untuk penanganannya.
6. Terkait penerimaan PPDB di sekolah-sekolah negeri dapat kami sampaikan bahwa penerimaan PPDB tersebut sudah sesuai SOP.

III. FRAKSI PARTAI KEBANGKITAN BANGSA

1. Terkait dengan PAD Dinas Kesehatan yang ditetapkan sebesar Rp 250.000.000 dan hanya terealisasi sebesar 60.912.000 atau 24, 36% merupakan pendapatan yang ditargetkan untuk pelayanan kesehatan di laboratorium kesehatan daerah. Target tersebut belum bisa tercapai dikarenakan gedung laboratorium kesehatan sedang dalam proses pembangunan gedung baru (pelayanan sementara hanya dikerjakan

menumpang pada salah satu ruangan gedung Puskesmas Pembantu) sehingga pelayanan yang diberikan belum optimal.

2. Terkait beberapa kegiatan di Dinas Kesehatan yang tidak terserap dapat kami sampaikan bahwa hal tersebut disebabkan
 - a. Pada prinsipnya anggaran tersebut bersifat persediaan dalam rangka penanganan pandemic Covid-19 sesuai amanat PMK No 17 Tahun 2021, bahwa mewajibkan anggaran dalam rangka penanggulangan Covid harus 8% dari DAU dan dalam pelaksanaannya dengan adanya kesiapsiagaan semua pihak, maka realisasinya disesuaikan dengan kondisi.
 - b. Realisasi kegiatan Akreditasi Fasilitas Kesehatan yang tidak terserap adalah karena tahun 2021 tidak ada penilaian (survei akreditasi) sesuai SE Menkes Nomor : HA.02.01/MENKES/455/2020 tentang Perijinan Dan Akreditasi Fasilitas Pelayanan Kesehatan Dan Penetapan Rumah Sakit Pendidikan Pada Masa Pandemic *Corono Virus* 2019 sehingga kegiatan yang untuk survey akreditasi di 11 Puskesmas tidak dilaksanakan.
3. Terhadap pendapatan RSUD yang melampaui target karena terdapat pencairan klaim atas layanan Tahun 2020 yang dicairkan pada Tahun 2021, dan terkait realisasi belanja modal tanah yang masih rendah kami sampaikan bahwa untuk belanja modal tanah telah dilakukan proses pengadaan tanah oleh Tim Pengadaan Pemerintah Daerah namun tidak terdapat kesepakatan harga dengan penjual.
4. Terkait realisasi pendapatan pada Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Perdagangan dapat dijelaskan bahwa target tersebut merupakan piutang retribusi penempatan awal. Pada Pasar Temanggung Permai, Pasar Parakan, dan Pasar Ngadirejo. Sudah dilakukan upaya penarikan piutang tesebut, akan tetapi belum ada kemampuan membayar dari pedagang yang antara lain karena letak kios atau los yang kurang strategis dan belum pulihnya 100% ekonomi akibat pandemi covid.
5. Terkait kegiatan koordinasi, sinkronisasi dan pelaksanaan kebijakan percepatan pengembangan penyebaran dan perwilayahan industri dapat kami sampaikan bahwa kegiatan tersebut merupakan kegiatan DBHCHT yang mana kegiatan tersebut tidak dapat dilaksanakan secara optiomal karena pedoman teknis terkait dengan pengembangan penyebaran dan perwilayahan industry terdapat persyaratan yang tidak mungkin dipenuhi oleh Pemerintah Daerah.
6. Terkait pembangunan Puskesmas Bulu dan Puskesmas Jumo sebagaimana jawaban kami atas pertanyaan fraksi PDIP.
7. Terkait dengan pengelolaan BUMD Aneka Usaha sebagaimana jawaban kami atas pertanyaan fraksi Gerindra.

IV. FRAKSI NUSANTARA

1. Terkait dengan tenaga supporting staff, dapat kami sampaikan bahwa toleransi keberadaannya sampai dengan November 2023. Sampai dengan saat ini beberapa daerah mengajukan keberatan terhadap kebijakan tersebut sehingga Pemerintah Daerah Kabupaten Temanggung mengambil kebijakan menunggu kebijakan teknis dari Pemerintah Pusat sambil melakukan pemetaan sesuai dengan kebutuhan daerah.
2. Terkait bantuan pupuk DBHCHT, sebagaimana jawaban kami pada fraksi Gerindra.
3. Terhadap permasalahan kegiatan pekerjaan pembangunan infrastruktur sebagaimana jawaban kami pada fraksi PDIP.
4. Upaya pencegahan PMK dilakukan dengan :
 - a. memperkuat "*public awarness*" dengan melakukan KIE tentang gejala, penanganan dan pencegahan kasus kepada petugas, pelaku usaha bidang peternakan dan peternak
 - b. Kontrol lalu lintas ternak, sebagai upaya mencegah penularan penyakit melalui OBH (orang, bahan, hewan), dengan menutup sementara akses jual beli ternak di 8 pasar hewan besar/kecil sesuai dengan Surat Edaran Sekda Nomor 000976/2022 dimana mulai hari ini Pasar Ternak mulai dibuka lagi.
 - c. membentuk URC PMK di DKPPP sebagai langkah respon cepat dinas terhadap laporan kasus PMK. Terhadap penutupan pasar-pasar hewan di Kabupaten Temanggung dapat kami pembukaan dilakukan tanggal 23 Juni 2022 dibuka kembali.

V. FRAKSI PARTAI GOLKAR

1. Terhadap temuan terkait Pembangunan Infrastruktur yang terdapat kelebihan pembayaran atau kurang volume, ke depan akan lebih selektif dalam penunjukan konsultan pengawas terhadap proyek-proyek yang ada.
2. Terkait dengan Belanja Bantuan Sosial dapat kami jelaskan bahwa tidak terlaksananya kegiatan yang bersumber DBHCHT sebagai akibat dari pedoman teknis pemberian bansos dari sumber dana tersebut berpotensi terjadi duplikasi pemberian bantuan sosial dari sumber dana yang lainnya.
3. Berkaitan dengan nilai Ekuitas atau tambahan kekayaan bersih selama tahun 2021 sebesar Rp.214,9M atau + 11% dari APBD, dapat dijelaskan bahwa tidak ada nilai ideal untuk ekuitas.
4. Terhadap realisasi sewa Barang Milik Daerah (Kios, Los Pasar Daerah) sebesar 11,5% dari anggaran sebesar Rp.3M, sebagaimana jawaban kami pada Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa.

5. Terkait dengan piutang Retribusi Menara/Tower sebesar Rp43,4 juta dapat dijelaskan bahwa retribusi tersebut sulit tertagih karena:
 - a. banyaknya peralihan kepemilikan tower tanpa pemberitahuan, sehingga ketika ditagih pemilik lama merasa piutang sudah bukan menjadi tanggung jawabnya sementara pemilik baru merasa bukan menjadi tanggungjawabnya karena ketika terjadi piutang belum menjadi miliknya
 - b. Banyak perpindahan alamat perusahaan sehingga tagihan dikembalikan karena alamat tidak dikenal, upaya yang sudah dilakukan adalah menagih dengan surat. Sampai dengan Bulan Mei 2022 sudah tertagih sebesar Rp81,9 juta dan akan terus dilakukan upaya penagihan.

VI. FRAKSI PARTAI PERSATUAN PEMBANGUNAN

1. Berkaitan dengan perbedaan laporan keuangan daerah antara LKPJ 2021 dan LPP APBD 2021 dikarenakan pada waktu LKPJ 2021 menggunakan data *unaudited*, sedangkan data LPP APBD 2021 menggunakan data *audited*.
2. Terhadap saran terkait dengan surplus yang cukup besar yang berasal dari pendapatan yang melampaui target dan keterserapan anggaran yang kurang optimal sehingga perencanaan kedepan harus lebih baik, kami perhatikan.
3. Berkaitan dengan kenaikan aset Pemerintah Kabupaten Temanggung tahun 2021 sebesar 5,3% berasal dari penambahan belanja modal. Untuk turunnya aset tahun 2020 dibanding tahun 2019 dikarenakan terdapat penurunan nilai pada aset lainnya.
4. Terkait dengan Silpa sebagaimana jawaban kami pada Fraksi Gerindra.
5. Terhadap saran agar kedepan perlu ditingkatkan komunikasi dan koordinasi antara dinas teknis, konsultan perencanaan, dan konsultan pengawas dan perlu evaluasi berkala pada setiap paket pekerjaan, kami perhatikan.

VII. FRAKSI PAN BERKEADILAN

1. Terkait saran agar seluruh Jajaran Pemerintah Kabupaten Temanggung untuk selalu meningkatkan kinerja yang lebih baik akan kami perhatikan dan kami laksanakan. Capaian Laporan Hasil Pemeriksaan dengan opini Wajar Tanpa Pengecualian merupakan kewajiban Pemerintah Daerah dalam pengelolaan keuangan daerah.
2. Terkait SiLPA akhir tahun 2021 berbeda dengan saldo akhir tahun 2021, dapat dijelaskan bahwa selisih antara SiLPA akhir tahun 2021 dengan saldo akhir tahun tersebut hanya disebabkan oleh utang pajak bukan karena kinerja yang belum baik.
3. Terkait dengan saran agar Pemerintah Daerah segera menindaklanjuti catatan dan rekomendasi BPK, dapat kami sampaikan bahwa sampai dengan saat ini proses tindak lanjut masih berjalan dan tindak lanjut sudah mencapai sekitar 98% dan atas

capaian ini menduduki rangking 1 untuk Wilayah Pemeriksaan Jateng 3. Capaian ini akan kami jadikan sebagai bahan untuk perbaikan dan peningkatan kinerja ke depan.

4. Terkait saran agar seluruh OPD melakukan upaya intensifikasi dan ekstensifikasi untuk meningkatkan PAD akan kami tindaklanjuti.
5. Terhadap saran agar Pemerintah Daerah lebih mengoptimalkan pengawasan dan pengendalian atas pelaksanaan kegiatan sebagaimana jawaban kami atas pertanyaan Fraksi Golkar.
6. Terkait dengan kualitas bangunan Puskesmas Bulu dan Puskesmas Jumo sebagaimana jawaban kami atas pertanyaan Fraksi Gerindra.

Rapat Dewan yang saya hormati,

Demikian jawaban saya atas pemandangan umum fraksi-fraksi DPRD Kabupaten Temanggung, manakala terdapat penjelasan/jawaban yang kurang menyukupi, kiranya dapat dibahas dan diperdalam pada rapat-rapat tingkat selanjutnya.

Akhirnya, semoga Allah Subhanahu Watta'alla, Tuhan Yang Maha Esa, senantiasa melimpahkan karunia-Nya kepada kita sebagai penyelenggara Negara di daerah, agar segala tugas yang kita emban mendapat bimbingan, petunjuk, dan lindungan-Nya. Amin.

Sekian, terima kasih, BUPATI TEMANGGUNG, H. M. AL KHADZIQ

Wassalamu'alaikum Warohmatrullahi Wa Barokatuh.

Kepada Saudara Bupati kami sampaikan terima kasih.

Rapat DPRD dan hadirin yang berbahagia.

Demikian tadi telah kita ikuti jawaban dan/atau penjelasan Bupati Temanggung terhadap Pandangan Umum Fraksi-Fraksi DPRD Kabupaten Temanggung atas Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten Temanggung Tahun Anggaran 2021.

Berdasarkan Pandangan Umum Fraksi-Fraksi DPRD serta Jawaban dan/ atau penjelasan Bupati Temanggung tersebut, maka dapat kami simpulkan sebagai berikut :

1. Menerima Surat Bupati Temanggung Nomor : P/408/900/23/VI/2022, tanggal 13 Juni 2022 perihal Penyampaian Raperda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2021.
2. Menerima usul, saran dan pendapat Fraksi-Fraksi DPRD dalam pembahasan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Temanggung Tahun Anggaran 2021.
3. Menyerahkan pembahasan lebih lanjut atas Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten

Temanggung Tahun Anggaran 2021 kepada Komisi-komisi DPRD, dan melaporkan hasil pembahasannya pada Rapat Paripurna DPRD berikutnya.

Apakah kesimpulan tersebut dapat di setujui ?

Rapat DPRD:

Dapat!

Pimpinan Rapat:

(Ketuk palu 1 kali) Terima kasih

Selanjutnya kami silahkan kepada Saudara Sekretaris DPRD untuk membacakan Rancangan Keputusan DPRD ----- Stop.

PEMBACAAN RANCANGAN KEPUTUSAN DPRD OLEH SEKRETARIS DPRD AGUS MUNADI, S.Sos.,M.Si
--

RANCANGAN KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN TEMANGGUNG NOMOR 12 TAHUN 2022 TENTANG PERSETUJUAN ATAS PENYAMPAIAN RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN TEMANGGUNG TENTANG PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN TEMANGGUNG TAHUN ANGGARAN 2021 PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN TEMANGGUNG,

Menimbang: a. bahwa berdasarkan Pandangan Umum Fraksi-fraksi DPRD terhadap Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Temanggung Tahun Anggaran 2021, serta jawaban dan/atau penjelasan Bupati Temanggung atas Pandangan Fraksi-fraksi DPRD dimaksud, maka DPRD menyatakan pendapatnya; b.Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu ditetapkan dengan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Temanggung; Mengingat : Satu dan seterusnya Memperhatikan: 1. Surat Bupati Temanggung Nomor : P/408/900/23/VI/2022, tanggal 13 Juni 2022 perihal Penyampaian Rancangan Peraturan Daerah Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021; 2. Musyawarah dan permufakatan para Anggota DPRD Kabupaten Temanggung dalam rapat Paripurna DPRD Kabupaten Temanggung pada tanggal 23 Juni 2022. MEMUTUSKAN: Menetapkan: KESATU: Menyetujui Penyampaian Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Temanggung Tahun Anggaran 2021. KEDUA: Menerima usul, saran dan pendapat Fraksi-fraksi DPRD Kabupaten Temanggung dalam pembahasan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah

Kabupaten Temanggung Tahun Anggaran 2021. KETIGA: Menyerahkan pembahasan lebih lanjut atas Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Temanggung Tahun Anggaran 2021 sebagaimana diktum KESATU Keputusan ini kepada Komisi-Komisi DPRD, selanjutnya Komisi-Komisi DPRD melaporkan hasil pembahasannya pada Rapat Paripurna DPRD berikutnya. KEEMPAT: Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan. Ditetapkan di Temanggung pada tanggal 23 Juni 2022 DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN TEMANGGUNG WAKIL KETUA, MUHAMMIN, S.Ag Salinan Keputusan ini disampaikan kepada: 1. Yth. Bupati Temanggung; 2. Yth. Pimpinan dan Anggota DPRD Kabupaten Temanggung; Kepada saudara Sekretaris DPRD kami sampaikan terima kasih. Kami tanyakan apakah Rancangan Keputusan DPRD tersebut dapat disetujui?

Rapat DPRD:

Dapat!

Pimpinan Rapat:

(Ketuk palu 1 kali) Terima kasih

Rapat Paripurna DPRD dan Hadirin yang berbahagia.

Dengan disetujuinya Rancangan Keputusan DPRD sesaat tadi, maka selesailah rangkaian acara Rapat Paripurna DPRD hari ini dan Rapat Paripurna akan segera kami akhiri.

Atas nama DPRD, kami menyampaikan terima kasih kepada Saudara Bupati Temanggung, Saudara Wakil Bupati Temanggung para Anggota Forum Koordinasi Pimpinan Daerah atau yang mewakili, dan hadirin sekalian yang telah mengikuti jalannya Rapat Paripurna pada hari ini, baik yang hadir diruangan ini maupun yang mengikuti secara virtual dari awal hingga selesai.

Sebelum kami akhiri, perlu kami umumkan hasil evaluasi Gubernur Jawa Tengah terhadap Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung tentang Retribusi Persetujuan Bangunan Gedung yang telah disempurnakan dan disesuaikan oleh Panitia Khusus 2 DPRD Kabupaten Temanggung, serta ditindaklanjuti dengan Keputusan Pimpinan DPRD Kabupaten Temanggung Nomor : 5/PIMP/VI/TAHUN 2022, tanggal 17 Juni 2022 dan sudah kami kirimkan kepada saudara Bupati Temanggung untuk ditindaklanjuti sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Akhirnya dengan memanjatkan puji syukur dan dengan mengucapkan Alhamdulillahirobbil'alamin, Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Temanggung, Rapat ke-6 Masa Persidangan III, Tahun 2021-2022 hari ini, Kamis tanggal 23 Juni 2022, Pukul 15.11 WIB, dengan resmi kami nyatakan ditutup ----- ketuk palu 3 kali.

Temanggung, 23 Juni 2022 Sekretaris Rapat Agus Munadi. S.Sos. M.Si Pimpinan Rapat Muhammad Amin, terima kasih.

Terima kasih.

Wassalamu'alaikum warohmatullahi wabarokatuh.

Sekretaris Rapat,

AGUS MUNADI, S.Sos., M.Si
Sekretaris DPRD